

PENGARUH DANA ALOKASI KHUSUS UNTUK PENDIDIKAN, DANA DEKONSENTRASI UNTUK PENDIDIKAN DAN PENDAPATAN PERKAPITA TERHADAP PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DI INDONESIA PADA TAHUN 2009-2013

**LATHIFA FITRIYANI
8105118046**



Skripsi ini Disusun Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI
KONSENTRASI PENDIDIKAN EKONOMI KOPERASI
JURUSAN EKONOMI DAN ADMINISTRASI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
2015**

**EFFECT OF SPECIAL ALLOCATION FUNDS FOR EDUCATION,
DECONCENTRATION FUNDS FOR EDUCATION AND INCOME
PERCAPITA ON EDUCATION IN INDONESIA IN 2009-2013**

**LATHIFA FITRIYANI
8105118046**



**Skripsi is Written as Part of Bachelor Degree in Education at Faculty of
Economics in State University of Jakarta**

**STUDY PROGRAM OF EDUCATION ECONOMIC
CONSCENTRATION IN EDUCATION ECONOMIC
COOPERATIVE
DEPARTMENT OF ECONOMIC AND ADMINISTRATION
FACULTY OF ECONOMIC
STATE UNIVERSITY OF JAKARTA
2015**

ABSTRAK

LATHIFA FITRIYANI. “Pengaruh Dana Alokasi Khusus Untuk Pendidikan, Dana Dekonsentrasi Untuk Pendidikan dan Pendapatan Perkapita Terhadap Pembangunan Pendidikan di Indonesia Tahun 2009-2013”. Pendidikan Ekonomi Koperasi, Ekonomi dan Administrasi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, 2015. Dosen Pembimbing: Dr.Siti Nurjanah SE, M.Si dan Ari Saptono, SE, M.Pd.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Dana Alokasi Khusus Untuk Pendidikan, Dana Dekonsentrasi Untuk Pendidikan dan Pendapatan Perkapita terhadap Pembangunan Pendidikan di Indonesia baik secara simultan maupun parsial. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, dengan jenis data *time series* periode 2009-2013 dan *cross-section* sebanyak 33 Provinsi di Indonesia. Penelitian ini menghasilkan 165 observasi, diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Keuangan, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Metode penelitian menggunakan metode *ekspose facto*. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda menggunakan software *Eviews 7,0*, output menunjukkan bahwa dana Alokasi Khusus untuk pendidikan (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Angka Partisipasi Murni Pendidikan Dasar (Y) di Indonesia, Dana Dekonsentrasi untuk pendidikan (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Angka Partisipasi Murni Pendidikan Dasar (Y) di Indonesia dan Pendapatan Perkapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap Angka Partisipasi Murni Pendidikan Dasar (Y) di Indonesia. Dari hasil uji F dengan memperhatikan nilai signifikansinya = $0,000000 < 0,05$ maka dapat dikatakan secara simultan Dana Alokasi Khusus Untuk Pendidikan, Dana Dekonsentrasi Untuk Pendidikan dan Pendapatan Perkapita berpengaruh signifikan pada $\alpha = 5\%$ terhadap Angka Partisipasi Murni Pendidikan Dasar. Nilai koefisien determinasi (R^2) diperoleh sebesar 0,876245 memiliki pengertian bahwa Angka Partisipasi Murni Pendidikan Dasar di Indonesia dapat dijelaskan oleh perubahan Dana Alokasi Khusus Untuk Pendidikan, Dana Dekonsentrasi Untuk Pendidikan dan Pendapatan Perkapita sebesar 87,62% sedangkan sisanya dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak ada dalam model penelitian ini.

Kata Kunci: Dana Alokasi Khusus untuk Pendidikan, Dana Dekonsentrasi Untuk Pendidikan, Pendapatan Perkapita, Pembangunan Pendidikan, Angka Partisipasi Murni Pendidikan Dasar

ABSTRACT

LATHIFA FITRIYANI. *“Effect of Special Allocation Fund for Education, concentration Fund for Education and Income Per Capita Against Development of Education in Indonesia Year 2009 to 2013”*. Cooperative Economics Education, Economics and Administration, Faculty of Economics, State University of Jakarta, 2015. Lecturer Advisor: Dr.Siti Nurjanah SE, M.Si and Ari Saptono, SE, M.Pd.

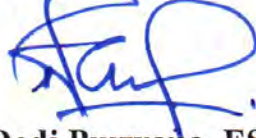
This study aims to determine how much influence the Special Allocation Fund for Education, concentration Fund for Education and income per capita to the Development of Education in Indonesia either simultaneously or partially. The data used in this research is secondary data, the type of time series data 2009-2013 period and cross-section as many as 33 provinces in Indonesia. This research resulted in 165 observations, obtained from the Central Statistics Agency (BPS), the Ministry of Finance, and of Ministry of Education and Culture. The research method using the exposure method facto. The data analysis technique used in this study is multiple regression analysis using software Eviews 7.0, the output indicates that the special allocation of funds for education (X1) positive and significant impact on enrollment at Primary Education (Y) in Indonesia, concentration Fund for education (X2) positive and significant impact on enrollment at Primary Education (Y) in Indonesia and per capita income and a significant positive effect on net enrollment Basic Education (Y) in Indonesia. From the test results with regard to the value F significance = 0.000000 < 0.05, it can be said simultaneously the Special Allocation Fund for Education, concentration Fund for Education and Income Per Capita significant effect on the $\alpha = 5\%$ of enrollment at Primary Education. The coefficient of determination (R²) obtained by 0.876245 had the sense that the net enrollment Basic Education in Indonesia can be explained by changes in the Special Allocation Fund for Education, concentration Fund for Education and income per capita amounted to 87.62% while the rest is explained by factors Another does not exist in this research model.

Keyword: Special Allocation Funds For Education, Deconcentration Funds For Education, Income Percapita, Development Education, Enrollment at Primary Education




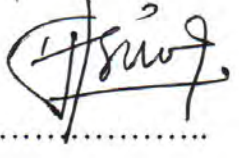

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Penanggung Jawab

Dekan Fakultas Ekonomi



Dr. Dedi Purwana, ES, M.Bus
NIP. 19671207 199203 1 001

Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1. <u>Karuniana Dianta A. S, S.IP, ME</u> NIP. 19800924 200812 1 002	Ketua		06/01 - 2016
2. <u>Dicky Iranto, SE, M.Si</u> NIP. 19710612 200112 1 001	Sekretaris		06/01 - 2016
3. <u>Sri Indah Nikensari, SE, M.Si</u> NIP. 19620809 199003 2 001	Penguji Ahli		06/01 - 2016
4. <u>Dr. Siti Nurjanah, SE, M.Si</u> NIP. 19720114 199802 2 001	Pembimbing I		06/01 - 2016
5. <u>Ari Saptono, SE, M.Pd</u> NIP. 19720715 200112 1 001	Pembimbing II		06/01 - 2016

Tanggal Lulus: 15 Desember 2015

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan karya asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik sarjana, baik di Universitas Negeri Jakarta maupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Skripsi ini belum dipublikasikan, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku di Universitas Negeri Jakarta.

Jakarta, Desember 2015

Yang membuat Pernyataan



Lathifa Fitriyani
NIM. 8105118046

LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“... Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmu hendaknya kamu berharap”
(QS Al-Insyirah: 6-8)*

*Untuk dapat apa yang kau suka, kau mesti dahulu bersabar dengan apa yang kau benci ...
(Imam Al-Ghazali)*

Segala sesuatu yang terjadi pasti akan selalu ada hikmah dan pelajaran yang bisa diambil berusahalah untuk mengambil hikmah disetiap kejadian..

Ku persembahkan skripsiku ini teruntuk mereka yang kucintai dan mereka yang mencintaiku, yang selalu mendoakan dan memberikan ku energi semangat disaat aku mulai lelah...

Papa, Mamak, Kakak dan Adikku tercinta,
4SA, dan Teman Seperjuangan Ekop nr 2011

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas curahan rahmat dan kasih sayang-Nya yang selalu mengiringi setiap langkah hamba-Nya, serta sholawat dan salam selalu tercurah untuk junjungan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, semoga syafaatnya selalu hadir pada umatnya hingga hari akhir. Alhamdulillahirobbil'alamin penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul Pengaruh Dana Alokasi Khusus untuk pendidikan, Dana Dekonsentrasi untuk pendidikan, dan Pendapatan Perkapita terhadap Pembangunan Pendidikan di Indonesia Pada Tahun 2009-2013.

Dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr.Siti Nurjanah,SE. M.Si selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Ari Saptono, SE. M.Pd selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan berbagai saran dan masukan, membimbing dengan sabar, dan memberikan dukungan moril kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Dedi Purwana ES, M.Bus, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta dan Bapak Drs. Nurdin Hidayat, MM, M.Si, selaku Ketua Jurusan Ekonomi dan Administrasi Universitas Negeri Jakarta.
3. Bapak Karuniana Dianta A.S, S.IP, M.E, selaku Ketua Konsentrasi Pendidikan Ekonomi Koperasi.

4. Kedua orang tercinta, Papa dan Mamak tercinta. Bapak Mustopa Syibli dan Ibu Dewi Kristalisa yang tiada henti mendoakan, meridhoi, dan dukungan baik moril maupun materil kepada penulis agar diberi kemudahan dalam mengerjakan skripsi ini.
5. Kakak dan adikku tersayang Kak Lia, Mas Hery, Adek Ningsi, Adek Iqbal yang dengan setulus hati memberikan begitu banyak doa, perhatian, dan dukungan baik moril maupun materil selama penulis mengerjakan skripsi ini.
6. Teman seperjuangan dari semester satu sampai sekarang 4SA (ratri,vera,tika) yang telah melengkapi hari-hari penulis dan telah memberikan semangat, doa dan saran.
7. Teman-teman seperjuangan di Pendidikan Ekonomi Koperasi NR 2011 yang selalu memberikan semangat.

Semoga segala bantuan tersebut mendapat limpahan balasan dari Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk semua pembacanya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan kekurangan dalam segi penulisan secara teknis maupun penyusunannya. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun.

Jakarta, Desember 2015

Lathifa Fitriyani

DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL PENELITIAN	i
TITLE	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
PERNYATAAN ORISINALITAS	vi
LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR GRAFIK	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	12
C. Pembatasan Masalah	13
D. Perumusan Masalah	13
E. Kegunaan Penelitian.....	14

BAB II KAJIAN TEORETIK

A. Deskripsi Konseptual	15
1. Pembangunan Pendidikan	15
2. Biaya Pendidikan	24
3. Dana Alokasi Khusus Untuk Pendidikan	27
4. Dana Dekonsentrasi Untuk Pendidikan	30
5. Pendapatan Perkapita	31
B. Hasil Penelitian yang Relevan	36
C. Kerangka Teoretik.....	39
D. Perumusan Hipotesis.....	42

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian	44
B. Objek dan Ruang Lingkup Penelitian	44
C. Metode Penelitian.....	45
D. Jenis dan Sumber Data	45
E. Operasionalisasi Variabel Penelitian	46
F. Konstelasi Pengaruh Antar Variabel	48
G. Teknik Analisis Data	50

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data	60
1. Angka Partisipasi Murni Pendidikan Dasar.....	60
2. Dana Alokasi Khusus Untuk Pendidikan	63
3. Dana Dekonsentrasi Untuk Pendidikan.....	66

4. Pendapatan Perkapita.....	69
B. Pengujian Hipotesis.....	72
1. Estimasi Model	72
2. Uji Metode Estimasi Data Panel	72
3. Uji Asumsi Klasik	74
4. Uji Hipotesis	76
C. Pembahasan	81
D. Keterbatasan Penelitian	85
BAB V KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN	
A. Kesimpulan	86
B. Implikasi.....	87
C. Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	90
LAMPIRAN	94
RIWAYAT HIDUP	115

DAFTAR TABEL

Tabel	Judul	Halaman
I.1	Peringkat <i>Human Development Index</i> (HDI) tahun 2010	3
I.2	Peringkat Angka Melek Huruf 15 Tahun Ke atas tahun 2005	5
I.3	Perkembangan Angka Partisipasi Murni di Indonesia.....	6
IV.1	Angka Partisipasi Murni Pendidikan Dasar Berdasarkan Beberapa Provinsi di Indonesia	61
IV.2	Angka Partisipasi Murni Pendidikan Dasar Berdasarkan Wilayah/Pulau di Indonesia	62
IV.3	Dana Alokasi Khusus Pendidikan Berdasarkan Beberapa Provinsi di Indonesia	63
IV.4	Dana Alokasi Khusus Pendidikan Dasar Berdasarkan Wilayah/Pulau di Indonesia	65
IV.5	Dana Dekonsentrasi untuk Pendidikan Berdasarkan Beberapa Provinsi di Indonesia	66
IV.6	Dana Dekonsentrasi untuk Pendidikan Berdasarkan Wilayah/Pulau di Indonesia	68
IV.7	Pendapatan Perkapita Berdasarkan Beberapa Provinsi di Indonesia (dalam ribu rupiah)	69
IV.8	Pendapatan Perkapita Berdasarkan Wilayah/Pulau di Indonesia (dalam ribu rupiah)	71
IV.9	Pengujian Signifikansi <i>Common Effect</i> dan <i>Fixed Effect</i>	

Angka Partisipasi Murni Pendidikan Dasar	73
IV.10 Pengujian Signifikansi <i>Fixed Effect</i> dan <i>Random Effect</i>	
Angka Partisipasi Murni Pendidikan Dasar	74
IV.11 Statistik Deskriptif	75
IV.12 Uji Heterokedastisitas	76
IV.13 Uji t Angka Partisipasi Murni Pendidikan Dasar	77
IV.14 Uji F Angka Partisipasi Murni Pendidikan Dasar	79
IV.15 Uji R^2 Angka Partisipasi Murni Pendidikan Dasar	80

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Judul	Halaman
III.1	Konstelasi Hubungan Antar Variabel	49
IV.2	Uji Normalitas	74

DAFTAR GRAFIK

Grafik	Judul	Halaman
I.1	Perkembangan Angka Buta Huruf Usia 15 Tahun ke atas di Indonesia Tahun 2004 2008	4
I.2	Angka Partisipasi Murni Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2009	7
I.3	Perkembangan Alokasi DAK Bidang Pendidikan di Indonesia Tahun 2003-2007 (jutarupiah).....	10
I.4	Perkembangan Alokasi Dana DekonTP Bidang Pendidikan di Indonesia Tahun 2009-2011 (juta rupiah)	11

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Judul	Halaman
1.	Data Mentah APMPD, DAK, DEKON dan Y_PERKAPITA Tahun 2009-2013	95
2.	Data LN_APMPD, LN_DAK, LN_DEKON dan LnY_PERKAPITA Tahun 2009-2013	100
3.	Model <i>Common Effect</i> Pada Model Persamaan Angka Partisipasi Murni Pendidikan Dasar	105
4.	Model Regresi <i>Fixed Effect</i> Pada Model Persamaan Angka Partisipasi Murni Pendidikan Dasar	106
5.	<i>Uji Chow</i> Pada Model Persamaan Angka Partisipasi Murni Pendidikan Dasar	108
6.	Model <i>Random Effect</i> Pada Model Persamaan Angka Partisipasi Murni Pendidikan Dasar	109
7.	<i>Uji Hausman</i> Pada Model Persamaan Angka Partisipasi Murni Pendidikan Dasar	110
8.	Tabel T	112
9.	Tabel F	113
10.	Tabel <i>Chi-Square</i>	114

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan memegang peranan yang penting untuk menjamin kelangsungan hidup suatu negara dan bangsa, karena pendidikan merupakan salah satu indikator untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Hampir semua bangsa menempatkan pembangunan pendidikan sebagai prioritas dalam program pembangunan nasional mereka¹. Untuk itu setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan sebagaimana yang telah tercantum pada pasal 31 UUD 1945, yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.

Purwo Uditomo mengatakan dalam bukunya bahwa pentingnya bersekolah kemudian dijadikan salah satu tolok ukur kualitas sumber daya manusia dan pendidikan di suatu negara². Dalam pengukuran *Human Development Index* (HDI) yang diterbitkan oleh *United Nations Developments Programme* (UNDP), ada tiga aspek besar yang dinilai yaitu kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Indikator sektor kesehatan dan usia hidup adalah angka harapan hidup per kelahiran. Indikator ekonomi adalah standar hidup, tingkat pendapatan domestik bruto perkapita yang dibelanjakan dalam satuan dolar Amerika (USD). Terakhir, Indikator pendidikan terdiri dari *adult*

¹Bappenas, *Evaluasi Pelaksanaan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun*, p.1

²Purwo Uditomo *et al.*, *Kebijakan dan Praktik Pendidikan Indonesia di Era Transisi Demokrasi* (Jawa Barat: Dompot Dhuafa Makmal Pendidikan, 2013), p.70

literacy rate (angka melek huruf usia dewasa) dan *enrollment ratio* (angka partisipasi sekolah) dan *mean years of schooling* (lama studi yang ditempuh). Jadi, semakin banyak yang buta huruf dan putus sekolah, akan semakin kecil nilai HDI-nya³.

Pengukuran *Education Development Index* (EDI) yang dilakukan oleh UNESCO melalui gerakan *Education for All* (EFA), pembangunan pendidikan diukur menggunakan empat indikator, yaitu *universal primary education* (yang dilihat dari persentase anak usia sekolah dasar yang masuk ke sekolah menengah), *adult literacy rate* (yang diukur dari angka melek huruf pada usia 15 tahun ke atas), *quality of education* (yang diperoleh dari angka bertahan siswa hingga kelas 5 SD) dan *gender-related EFA* (yang menunjukkan angka partisipasi pendidikan menurut kesetaraan gender, baik *gender parity* maupun *gender quality*). Lagi-lagi angka putus sekolah dan buta huruf akan menentukan capaian kualitas penduduk di suatu negara⁴.

Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pembangunan menempatkan Indonesia ke posisi 108 dari 182 negara dalam pemeringkatan *Human Development Index* (HDI) pada tahun 2010. Menurut UNDP Indonesia mendapatkan angka HDI sebesar 0,734 masih lebih kecil ketimbang angka HDI di beberapa negara di Asia Tenggara, Indonesia masih berada jauh dibawah negara tetangga terdekatnya Malaysia yang menduduki posisi ke-66 dari 182 negara. Indonesia hanya unggul atas Vietnam dan Laos (Tabel I.1).

³*Ibid*

⁴*Ibid*

Tabel I.1

Peringkat *Human Development Index* (HDI) Tahun 2010

No	Negara	Peringkat	Angka HDI
1.	Singapura	23	0.944
2.	Brunei Darrusalam	30	0.920
3.	Malaysia	66	0.829
4.	Thailand	86	0.783
5.	Filipina	105	0.751
6.	Indonesia	108	0.734
7.	Vietnam	116	0.721
8.	Laos	133	0.675

Sumber : *Human Deveploment Report*, diolah

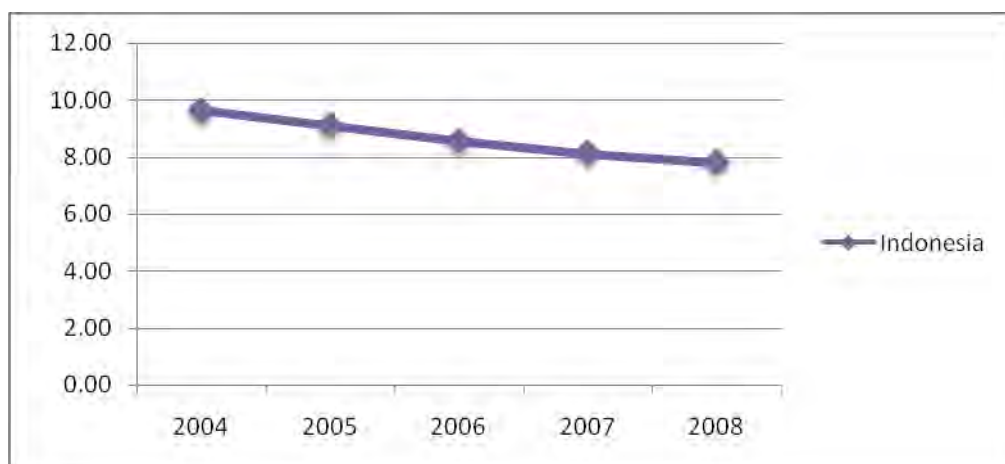
Kualitas pendidikan dijadikan sebagai faktor utama dalam menentukan pemeringkatan HDI memang sangat tepat dan strategis. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan selaku pemegang amanah pelaksanaan sistem pendidikan nasional memiliki kewajiban untuk mewujudkan misi pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010, yaitu: 1) Peningkatan kualitas sumber daya manusia; 2) Perkembangan kemampuan ilmu dan teknologi; dan 3) Penguatan daya saing perekonomian⁵.

Untuk mewujudkan harapan tersebut, Kemendikbud menetapkan beberapa strategi dan program dasar pembangunan pendidikan yang disusun berdasarkan skala prioritas. Sehingga sebuah perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat

⁵Bappenas, *Pedoman Penyusunan RPJMN 2010-2014*, p.11

didasarkan pada tiga pilar: 1) Pemerataan dan perluasan akses pendidikan; 2) Peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan; dan 3) Peningkatan tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik.

Harapan tersebut belum sepenuhnya terwujud, kualitas pembangunan pendidikan di Indonesia masih belum maksimal ini terlihat dari *Human Development Index* (Indeks Pembangunan Manusia), khususnya di bidang pendidikan yang kurang mengalami peningkatan cukup berarti. Misalnya indikator pendidikan untuk angka melek huruf dan angka partisipasi sekolah yang dilihat dari angka partisipasi murni.



Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Grafik I.1

**Perkembangan Angka Buta Huruf Usia 15 Tahun ke Atas di
Indonesia Tahun 2004-2008**

Grafik I.1 menunjukkan angka buta huruf usia 15 tahun ke atas di Indonesia yang mengalami penurunan. Tahun 2004 angka buta huruf di Indonesia sebesar 9,62%, tahun 2005 sebesar 9,09%, tahun 2006 sebesar 8,55%, tahun 2007 sebesar 8,13% dan tahun 2008 sebesar 7,81%. Penurunan

angka buta huruf usia 15 tahun ke atas di Indonesia setiap tahunnya kurang lebih 0,43%-0,54%. Jika dilihat dari selisih presentasi penurunannya masih terbilang kecil. Artinya jika tidak ada perubahan pola penanggulangan buta huruf, butuh waktu sangat lama untuk mencapai nilai minimum. Apalagi jika mengingat bahwa jumlah penduduk di Indonesia setiap tahunnya bertambah, bisa jadi secara persentase angka buta huruf mengalami penurunan, namun secara kuantitas jumlah penduduk yang buta huruf tidak ada perubahan⁶.

Tabel I.2

Peringkat Angka Melek Huruf 15 Tahun ke Atas Tahun 2005

No	Negara	Peringkat	AMH
1.	Brunei Darrusalam	71	92,7
2.	Filipina	72	92,6
3.	Thailand	72	92,6
4.	Singapura	74	92,5
5.	Malaysia	82	93,0
6.	Indonesia	85	90,0
7.	Vietnam	87	89,7
8.	Myanmar	96	87,7
9.	Kamboja	127	73,6
10.	Laos	135	68,7

Sumber: *Laporan Program Pembangunan 2005*⁷

Berdasarkan laporan program pembangunan tahun 2005 Angka Melek Huruf, Indonesia masih menduduki peringkat ke-85 dari 182 negara (lihat

⁶Purwo Uditomo *et al.*, op. cit., p.74

⁷http://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_negara_menurut_tingkat_melek_huruf, diakses pada tanggal 25 maret 2015

tabel I.2). Negara tetangga Malaysia lebih unggul dibandingkan Indonesia. Pada tahun 2005 baru 90% yang melek huruf, itu artinya belum seluruh rakyat Indonesia terbebas dari buta huruf. Pada tahun 2013, Pria Gunawan selaku Kepala Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Nonformal dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, menyatakan bahwa sebanyak 3,6 juta warga Indonesia yang masih buta aksara⁸.

Tabel I.3
Perkembangan Angka Partisipasi Murni di Indonesia

No	Tahun	Jenjang		
		SD	SMP	SMA
1.	2007	94,90	72,02	49,94
2.	2008	95,14	73,62	52,81
3.	2009	95,23	74,52	55,73

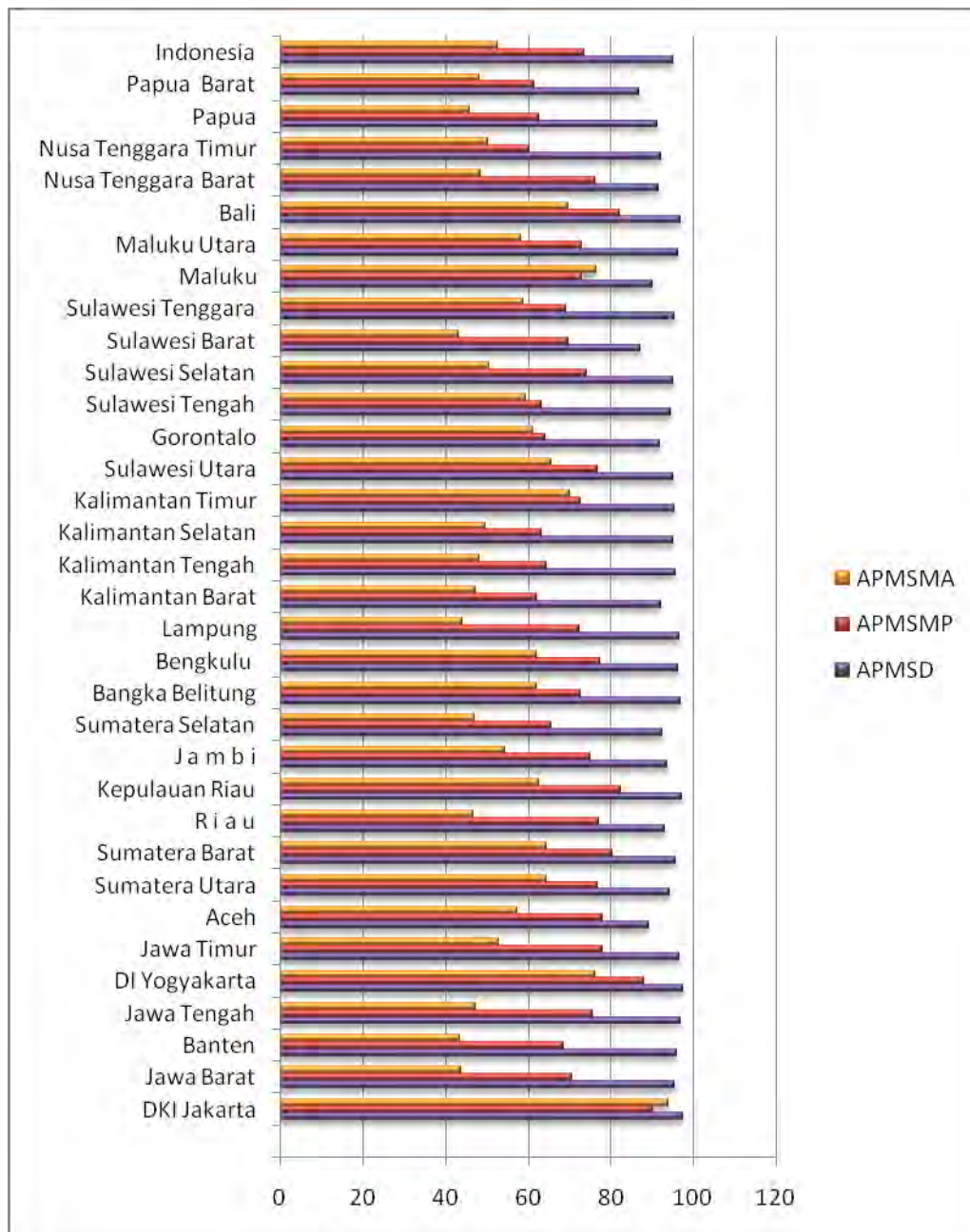
Sumber: Kemendikbud, diolah

Indikator pendidikan lainnya yaitu Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah (lihat grafik I.2), berdasarkan data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terlihat masih rendahnya jumlah pelajar usia 16 tahun hingga 18 tahun untuk bersekolah. Secara nasional, APM SD/MI (usia 7 hingga 12 tahun) di tahun 2009 mencapai 95,23 persen. Pada tahun yang sama, APM untuk SMP/MTs (usia 13 hingga 15 tahun) mengalami penurunan yang cukup besar yaitu mencapai 74,52 persen. Kemudian, terus mengalami penurunan menjadi 55,73 persen untuk APM tingkat SMA/MA (usia 16 hingga 18 tahun). Dilihat dari persentasenya untuk setiap jenjang belum ada

⁸<http://www.tempo.co/read/news/2013/11/29/079533298/36-Juta-Warga-Indonesia-Masih-Buta-Aksara>, diakses pada tanggal 25 Maret 2015

yang mencapai 100 persen baik untuk tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA.

Artinya masih banyak anak yang bersekolah tidak sesuai dengan usianya.



Sumber: Kemendikbud, diolah

Grafik I.2

Angka Partisipasi Murni Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2009

Grafik APM jenjang SD sampai SMA menurut provinsi di Indonesia menunjukkan bahwa masih beragamnya APM pada setiap provinsi. Angka partisipasi Murni dari jenjang SD, SMP, SMA yang tertinggi adalah provinsi DKI Jakarta sebesar 97,61% untuk SD, 90,04% untuk SMP, dan 94,10 untuk SMA. Sedangkan APM terendah untuk jenjang SD adalah provinsi Papua Barat sebesar 86,91%. Jenjang SMP APM terendah adalah provinsi NTT sebesar 60,46% dan untuk jenjang SMA APM terendah adalah Sulbar sebesar 43,24%. Jika dibandingkan dengan APM Nasional, untuk jenjang SD hanya ada 14 provinsi yang mencapai APM Nasional, jenjang SMP 18 Provinsi dan jenjang SMA 16 Provinsi.

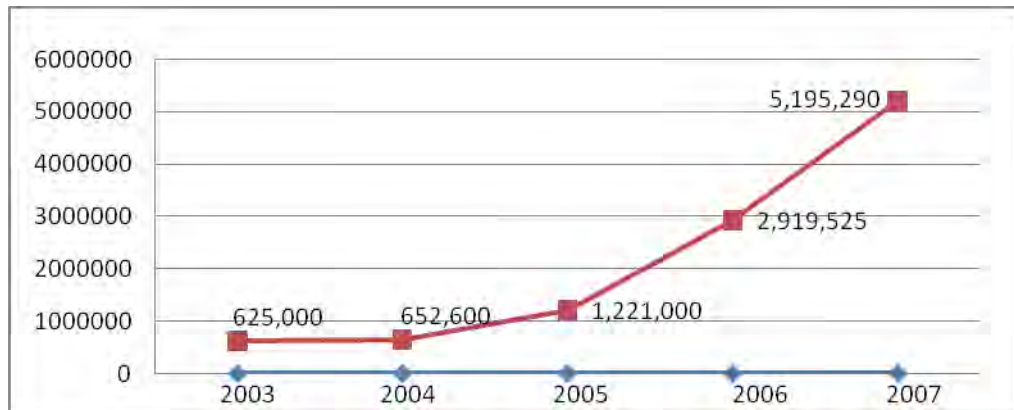
Dari beberapa data yang telah diuraikan diatas menggambarkan masih kurang maksimalnya kualitas pembangunan pendidikan kita, Indonesia masih belum terbebas dari buta huruf dan masih kurangnya kesadaran masyarakat bersekolah tepat waktu sesuai usianya. Masih rendahnya kualitas pembangunan pendidikan ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti distribusi guru yang tidak merata. Guru di Indonesia cukup memadai tetapi penyebarannya saja yang kurang merata hanya terpusat di kota-kota besar saja. Banyak sekolah di Ibu kota yang kelebihan jumlah guru tetapi guru-guru di beberapa wilayah Indonesia bagian Timur misalnya Papua justru jarang hadir karena berbagai alasan⁹. Ini tentu mencerminkan ketimpangan kualitas pendidikan.

⁹Purwo Uditomo *et al.*, op. cit., p.23

Kualitas pembangunan pendidikan juga tidak terlepas dari kebijakan pemerintah. Sejak di Implementasikannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah dan Undang-Undang 25 tahun 1999 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 telah terjadi perubahan yang cukup fundamental dalam mekanisme penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Undang-Undang di bidang otonomi daerah tersebut telah menetapkan pemberian kewenangan otonomi dalam wujud otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah untuk menetapkan prioritas pembangunan dan mengelola segala potensi daerah dan pemberdayaan sumber daya setempat sesuai dengan kepentingan masyarakat. Implikasi dari kewenangan otonomi daerah menuntut daerah untuk melaksanakan pembangunan di segala bidang, terutama untuk sarana dan prasarana publik (*public service*), yang dengan kata lain mensyaratkan adanya kebijakan pengeluaran pemerintah daerah yang mandiri dan profesional dalam investasi publik.

Dalam prakteknya dengan adanya desentralisasi ini berarti memberikan kewenangan kepada daerah untuk memanfaatkan semua sumber keuangan sendiri dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sumber utamanya adalah pajak daerah dan retribusi daerah. Pemerintah Pusat tetap memainkan peran penting dalam mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan yang didesentralisasikan ke Pemerintahan daerah. Untuk itu, Pemerintah Pusat

melakukan transfer dana ke daerah melalui beberapa mekanisme, yaitu antara lain dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dibebankan ke APBD.



Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, diolah

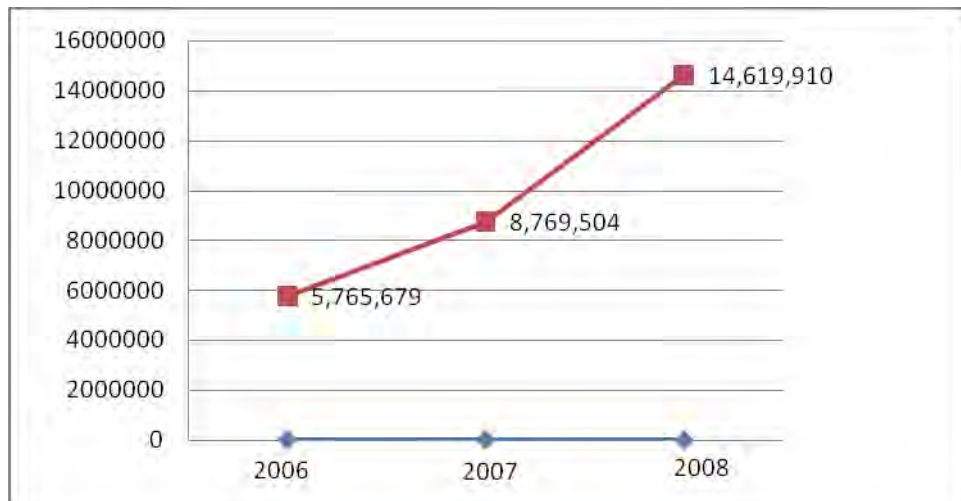
Grafik I.3

Perkembangan Alokasi DAK Bidang Pendidikan di Indonesia Tahun 2003-2007 (juta rupiah)

Berdasarkan grafik I.4 terlihat bahwa komitmen pemerintah dalam mendukung pelaksanaan pembangunan pendidikan tercermin dari alokasi DAK bidang pendidikan yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2003 DAK bidang Pendidikan sebesar 625.000 juta kemudian meningkat hingga 5.195.290 juta pada tahun 2007. Di Indonesia gedung sekolah merupakan fasilitas penting bagi anak-anak untuk menimba ilmu. Kerusakan gedung sekolah akan berdampak dengan ketidaknyamanan siswa dalam proses belajar mengajar. Tidak semua anak-anak Indonesia menikmati hari-harinya belajar di sekolah karena buruknya kondisi fisik ruang kelas. Tak jarang ada anak-anak yang putus sekolah dikarenakan ruang kelas yang tak layak atau masih kurang. DAK yang secara khusus digunakan untuk pembangunan dan

rehabilitasi sarana dan prasarana fisik ini diharapkan dapat memperbaiki mutu pendidikan melalui perbaikan infrastruktur.

Selain DAK ada juga Dana Dekonsentrasi yang dibiayai atas beban APBN yang di transfer ke daerah.



Sumber: Direktorat Jenderal Anggaran, diolah

Grafik I.4

Perkembangan Alokasi Dana Dekonsentrasi Bidang Pendidikan Tahun 2006-2008 di Indonesia (juta rupiah)

Dana Dekonsentrasi di Indonesia sama seperti DAK juga mengalami peningkatan. Dana Dekonsentrasi ini bersumber dari APBN dan dibiayai atas beban APBN berbeda dengan DAK yang bersumber dari APBN tetapi dibiayai atas beban APBD.

Selain dari alokasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah, rumah tangga juga berperan untuk meningkatkan kualitas pembangunan pendidikan. Dikutip dari Maghfirroh, Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional pada tahun 2003 telah mempublikasikan bahwa porsi biaya pendidikan yang ditanggung orangtua/siswa berkisar antara 63,35% persen hingga 87,75% dari biaya pendidikan total. Adapun porsi biaya

pendidikan yang ditanggung pemerintah dan masyarakat (selain orangtua/siswa) adalah antara 12,22% dan 36,5% dari biaya pendidikan total¹⁰. Ini artinya pengeluaran yang dikeluarkan rumah tangga untuk pendidikan masih cukup besar dibandingkan oleh pemerintah.

Sejalan dengan uraian di atas, bahwa terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi kualitas pembangunan pendidikan di Indonesia. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti tentang masalah kualitas pembangunan pendidikan di Indonesia.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang tertulis di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah yang mempengaruhi kualitas pembangunan pendidikan, yaitu sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh antara kebijakan desentralisasi fiskal terhadap Angka Partisipasi Murni?
2. Apakah terdapat pengaruh antara rasio guru per murid terhadap kualitas Angka Partisipasi Murni?
3. Apakah terdapat pengaruh antara DAK untuk pendidikan terhadap Angka Partisipasi Murni?
4. Apakah terdapat pengaruh antara Dana Dekonsentrasi untuk pendidikan terhadap Angka Partisipasi Murni?
5. Apakah terdapat pengaruh antara pendapatan perkapita terhadap angka partisipasi murni?

¹⁰Maghfirroh Yenny, *Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Pembangunan Pendidikan di Indonesia*,(Depok:UI,2008),p.10

6. Apakah terdapat pengaruh antara pengeluaran rumah tangga untuk pendidikan terhadap Angka Partisipasi Murni?
7. Apakah terdapat pengaruh antara kebijakan desentralisasi fiskal terhadap Angka Melek Huruf?
8. Apakah terdapat pengaruh antara DAK untuk pendidikan terhadap Angka Melek Huruf?
9. Apakah terdapat pengaruh antara Dana Dekonsentrasi untuk pendidikan terhadap Angka Melek Huruf ?
10. Apakah terdapat pengaruh antara Pendapatan Perkapita terhadap Angka Melek Huruf?

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, kualitas pembangunan pendidikan di Indonesia disebabkan oleh banyak faktor. Berhubung keterbatasan yang dimiliki oleh peneliti maka penelitian ini dibatasi hanya pada masalah: “Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pendidikan, Dana Dekonsentrasi untuk pendidikan dan Pendapatan Perkapita terhadap Pembangunan Pendidikan”.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka masalah dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh antara DAK untuk pendidikan terhadap Angka Partisipasi Murni Pendidikan Dasar di Indonesia?

2. Apakah terdapat pengaruh antara Dana Dekonsentrasi untuk pendidikan terhadap Angka Partisipasi Murni Pendidikan Dasar di Indonesia?
3. Apakah terdapat pengaruh antara Pendapatan Perkapita terhadap Angka Partisipasi Murni Pendidikan Dasar di Indonesia?
4. Apakah terdapat pengaruh antara DAK untuk pendidikan, Dana Dekonsentrasi untuk pendidikan dan Pendapatan Perkapita terhadap Angka Partisipasi Murni Pendidikan Dasar di Indonesia?

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi semua pihak. Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoretis

Penelitian ini berguna untuk menambah referensi dan pengetahuan baru mengenai Dana Alokasi Khusus untuk pendidikan, Dana Dekonsentrasi untuk pendidikan, pendapatan perkapita serta pengaruhnya terhadap pembangunan pendidikan, sehingga penelitian ini dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi semua pihak.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan, bahan acuan, masukan serta referensi selanjutnya, dan dapat digunakan sebagai salah satu pemecahan masalah mengenai Dana Alokasi Khusus untuk pendidikan, Dana Dekonsentrasi untuk pendidikan, pendapatan perkapita serta pengaruhnya terhadap pembangunan pendidikan, sehingga penelitian ini dapat berguna bagi semua pihak.

BAB II

KAJIAN TEORETIK

A. Deskripsi Konseptual

1. Pembangunan Pendidikan

Pendidikan dalam arti sederhana dikemukakan Hasbullah sebagai usaha manusia untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai di dalam masyarakat dan kebudayaan¹¹. Menurut Langeveld yang dikutip dalam Hasbullah pendidikan ialah setiap usaha, pengaruh, perlindungan dan bantuan yang diberikan kepada anak tertuju kepada pendewasaan anak itu, atau lebih tepat membantu anak agar cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri. Pengaruh itu datangnya dari orang dewasa (atau yang diciptakan oleh orang dewasa seperti sekolah, buku, putaran hidup sehari-hari, dan sebagainya) dan ditunjukkan kepada orang yang belum dewasa¹².

Menurut John Dewey yang dikutip dalam Hasbullah pendidikan adalah proses pembentukan kecakapan-kecakapan fundamental secara intelektual dan emosional kearah alam dan sesama manusia¹³. Menurut Drikarya, pendidikan adalah pemanusiaan manusia muda atau pengangkatan manusia muda ke taraf insani. Menurut Ki Hajar Dewantara pendidikan yaitu tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak, adapun maksudnya pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagian

¹¹Hasbullah, *Dasar-dasar Ilmu Kependidikan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009) p.1

¹²*Ibid*.p.2

¹³*Ibid*

manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya.

Menurut D.B. Hol Singer yang dikutip dalam Zainuddin, pendidikan merupakan barang konsumsi dan barang investasi. Pendidikan merupakan barang konsumsi (*consumption goods*) menandakan bahwa pendidikan merupakan kebutuhan setiap insan dan karenanya masyarakat selalu membutuhkan, semakin tinggi tingkat pendapatan masyarakat akibat pembangunan semakin besar pula tingkat kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan. Dengan pendidikan kemungkinan mendapatkan tambahan manfaat dan nilai relatif cukup besar karena melalui pendidikan ada tambahan pengetahuan dan keterampilan yang dapat digunakan untuk menjawab tantangan yang ada.

Sedangkan pendidikan merupakan barang investasi (*investment goods*) yang berarti sejumlah pengeluaran untuk mendukung pendidikan yang dilakukan orangtua, masyarakat dan pemerintah dalam jangka pendek untuk mendapatkan manfaat dalam jangka panjang. Keluarga, masyarakat dan pemerintah rela melakukan pengorbanan untuk kepentingan demi manfaat di masa mendatang¹⁴.

Zainuddin mengemukakan bahwa pengelolaan pendidikan adalah pihak yang terkait langsung dengan proses pendidikan. Pendidikan tidak ubahnya dengan proses produksi yang bergerak untuk mengubah serangkaian sumber-sumber menjadi output atau keluaran. Dengan demikian proses pendidikan

¹⁴Zainuddin, *Reformasi Pendidikan Kritik Kurikulum dan Manajemen Berbasis Sekolah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), p.42-43

merupakan tindakan mengubah sumber-sumber pendidikan menjadi keluaran pendidikan¹⁵.

Berdasarkan beberapa teori yang telah dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah proses manusia dalam mencapai tingkat kedewasaan dan memiliki suatu keahlian.

Paradigma pembangunan adalah suatu proses menyeluruh yang menyentuh seluruh aspek, baik ekonomi, sosial, budaya, hukum, dan lainnya. Pembangunan merupakan cara pandang terhadap suatu persoalan pembangunan, dalam arti pembangunan baik sebagai proses maupun sebagai metode untuk mencapai peningkatan kualitas hidup manusia dan kesejahteraan rakyat. Paradigma pembangunan di Indonesia mengalami perkembangan dari beberapa tahap sebagai berikut: pertama, paradigma pertumbuhan (*growth paradigm*); kedua, pergeseran dari paradigma pertumbuhan menjadi paradigma kesejahteraan (*Welfare paradigm*); dan ketiga, paradigma pembangunan yang berpusat pada manusia (*people centered development paradigm*).

Kata pembangunan di Indonesia sudah menjadi kata kunci bagi segala hal. Menurut Budiman secara umum, pembangunan diartikan sebagai usaha untuk memajukan kehidupan masyarakat dan warganya¹⁶. Menurut PBB yang dikutip dalam Nugroho, pembangunan sebagai sebuah upaya atau proses dinamis tanpa akhir. Disebutkan dalam dokumennya bahwa *development is*

¹⁵*Ibid.* p. 43

¹⁶Arief Budiman, *Teori Pembangunan Dunia Ketiga* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama), p.1

*not a static concept. It is continuously changing*¹⁷. Selanjutnya pemikiran ini dikembangkan oleh Rektor Universitas PBB, Soedjatmoko mendefinisikan pembangunan sebagai:

“...sebuah proses pembelajaran dari suatu kehidupan ke suatu kehidupan yang lebih baik... Pembangunan bukan sebagai sesuatu yang dilakukan melalui berbagai tindakan ataupun melalui keahlian-keahlian yang diperoleh melainkan sebagai sesuatu yang dipelajari. Belajar dalam arti disini, adalah peningkatan kemampuan masyarakat, baik secara individual maupun kolektif, tidak hanya untuk menyesuaikan diri dengan perubahan melainkan juga untuk mengarahkan perubahan menuju tujuan-tujuan masyarakat¹⁸ .

Ignas Kleden membuat intisari dari gagasan Soedjatmoko dalam konteks membangun otonomi dalam rangka menciptakan “dinamik suatu masyarakat”.

Dikatakan Kleden:

“Inilah rupanya yang dinamakan Soedjatmoko dinamik suatu masyarakat. Dengan demikian pembangunan lalu berarti merangsang suatu masyarakat sehingga gerak majunya menjadi otonom, berakar kepada dinamik masyarakat sendiri dan dapat bergerak atas kekuatan sendiri. Dengan lain perkataan, pembangunan haruslah dilihat dalam kedudukannya sebagai suatu sarana untuk menyelamatkan dan memperkuat otonomi suatu masyarakat dan bukan malah mematikan atau menghancurkannya. Dengan demikian, tidak ada model pembangunan yang berlaku universal”¹⁹ .

Pemahaman Soedjatmoko adalah bahwa pembangunan merupakan sebuah proses alami, otonom dan kontekstual. Kekuatan dari Soedjatmoko adalah melihat bahwa pembangunan adalah proses belajar yang bertahap, sehingga selalu ada proses kapitalisasi kemajuan pada setiap tahap. Pembangunan dipahami sebagai sebuah proses yang positif dari tahap ke tahap. Kelemahan dari pemahaman ini adalah pengabaian proses persaingan yang bersifat *zero*

¹⁷ Riant Nugroho, *Kebijakan Pendidikan yang Unggul* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), p.14

¹⁸ Soedjatmoko, *Menjelajah Cakrawala: Kumpulan Karya Visioner Soedjatmoko* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994), p.50

¹⁹ Soedjatmoko, *Etika Pembebasan: Pilihan Karangan tentang Agama Kebudayaan Sejarah dan Ilmu Pengetahuan* (Jakarta: LP3ES, 1996), p. xviii

sum game antarnegara bangsa, kawasan, ras, maupun budaya. Pemahaman yang sebangun dikembangkan oleh Ilmuwan Sosial yang mempunyai pemahaman yang luas dan mempunyai pengaruh kuat, yaitu Amartya Sen dan Michael P. Todaro. Menurut Sen yang dikutip dalam Nugroho pembangunan sebagai pemerdekaan manusia, atau *development as freedom*. Dikatakannya²⁰:

“Development can be seen, it is argued here, as a process of expanding the real freedom that people enjoy. Focusing on human freedoms contrasts with narrower views of development, such as identifying development with growth of gross national product, or with technological advance, or with social modernization... Viewing development in term of expanding substantive freedoms directs attention to the ends that make development important, rather than merely to some means, that, inter alia, play a prominent part in the process.”

Sementara itu, Todaro memahami pembangunan sebagai berikut²¹:

“Development is the process of improving the quality of all human lives. There equally important aspects of development are (1) raising people’s living levels-their incomes and consumption levels of food, medical services, education, etc, through relevant economic growth process; (2) creating conditions conducive to the growth of people’s self-esteem through the establishment of social, political, and economic system and institutions that promote human dignity and respect; and (3) increasing people’s freedom by enlarging the range of their choice variables, as by increasing varieties of consumer goods and services.

Jika Sen memahami bahwa pembangunan adalah proses membuka beban yang membuat manusia tidak mampu mengembangkan kapasitasnya (*unleashing the hidden capacity of the human being*), maka todaro mempunyai pemahaman yang sama namun praktikal dengan memberikan indikator-

²⁰Riant Nugroho, *op.cit.*, p. 16

²¹*Ibid*

indikator di mana kapasitas yang dimaksud berkenaan dengan tingkat kehidupan, khususnya di bidang ekonomi.

Nugroho mengemukakan bahwa pembangunan bukan hanya proses menuju kehidupan yang lebih baik melalui proses pembelajaran dan penahapan tetapi juga merupakan sebuah proses perubahan sosial yang yang direncanakan oleh pemerintah dari negara-negara yang sedang berkembang yang bersifat mendasar dan menyeluruh dalam rangka membangun kesejahteraan bagi rakyatnya, sekaligus mengejar ketertinggalannya terhadap negara maju. Pemahaman ini memahami bahwa “pembangunan” di negara-negara maju tidak dikategorikan sebagai “pembangunan”, karena lebih merupakan sebuah proses perubahan sosial yang lebih bersifat alami, mandiri, otonom, dan “berasal dari dalam” daripada perubahan di negara berkembang yang bersifat direncanakan, di rekayasa terikat kepada banyak variabel, dan merupakan proses internalisasi nilai luar daripada “perubahan berasal dari dalam”.

Menurut Buchori, pembangunan dapat dilihat sebagai upaya untuk mengenali kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam kehidupan masyarakat sekarang ini dan selanjutnya menentukan serta melaksanakan tindakan-tindakan tertentu untuk meluruskan kekurangan-kekurangan tersebut dan dengan demikian menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih baik di masa depan²².

²²Mochtar Buchori, *Pendidikan dalam Pembangunan* (Yogyakarta:Tiara Wacana, 1994), p.54

Berdasarkan beberapa pendapat ahli dapat disimpulkan bahwa pembangunan adalah perubahan yang dilakukan secara terencana untuk mengatasi kekurangan-kekurangan yang ada dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat agar menjadi lebih baik dan dilakukan dengan proses dinamis tanpa akhir.

Pendidikan pada umumnya dipandang sebagai faktor utama dalam pembangunan, bahkan sebagai “kunci pembangunan”. Kemampuan pendidikan untuk menopang proses pembangunan sangat ditentukan oleh relevan atau tidaknya dalam program pendidikan yang dilaksanakan terhadap jenis pembangunan yang sedang diupayakan²³.

Isjoni mengatakan bahwa secara hakiki pembangunan pendidikan merupakan investasi masa depan, artinya hasil yang diharapkan melalui proses panjang, perlu dimensi waktu dan perencanaan yang matang²⁴. Sejalan dengan Isjoni, Irianto mengemukakan bahwa pembangunan pendidikan nasional merupakan upaya bersama seluruh komponen pemerintah dan masyarakat yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk mewujudkan peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara²⁵. Dapat disimpulkan bahwa pembangunan pendidikan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas masyarakat melalui pendidikan.

²³*Ibid.*, p. 56

²⁴Isjoni, *Wajah Baru Pendidikan Kita* (Riau: Unri Press, 2005), p.57

²⁵Yoyon Bachtiar, *Kebijakan Pembaruan Pendidikan* (Jakarta:RajaGrafindo Persada, 2012), p.3

Pembangunan pendidikan pada dasarnya sama pentingnya dengan pembangunan ekonomi. Karena pembangunan ekonomi sangat susah dijalankan jika sumber daya manusia (SDM) tidak mempunyai kemampuan. Sebagai bahan perbandingan, dapat kita lihat negara-negara tetangga seperti Jepang, Korea, Singapura, dan lainnya tidak memiliki sumber daya alam yang memadai, tetapi mereka memiliki SDM yang andal dan mendukung pergerakan roda ekonomi negara untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya sehingga mereka dapat menikmati hidup layak²⁶.

Untuk mengukur pencapaian pembangunan pendidikan, UNDP menggunakan indikator *literacy rate* (angka melek huruf), *school enrollment ratio* (angka partisipasi sekolah) dan *mean years of schooling* (lama studi yang ditempuh). Pencapaian pembangunan pendidikan di Indonesia yang dikutip dari Lembaga Penelitian SMERU secara kuantitas dapat dilihat dari beberapa indikator seperti Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka *Drop Out* (ADO), dan Angka Melanjutkan (AM). Dalam penelitian ini, untuk mengukur pembangunan pendidikan di Indonesia digunakan indikator pendidikan yaitu Angka Partisipasi Murni pendidikan dasar.

Angka partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah siswa kelompok usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase.

²⁶Mulyono, *Konsep Pembiayaan Pendidikan* (Jogjakarta: AR-RUZZ Media, 2010), p.22

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) APM adalah proporsi anak sekolah pada satu kelompok usia tertentu yang bersekolah pada jenjang yang sesuai dengan kelompok usianya²⁷. Indikator APM ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan yang sesuai. APM juga merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan.

Rumus:

$$\text{APM} = \frac{\text{Jumlah siswa kelompok usia sekolah di jenjang tertentu} \times 100\%}{\text{Jumlah penduduk kelompok usia tertentu}}$$

Pendidikan Dasar : kelompok usia 7-15 tahun (SD, SMP)

Semakin tinggi APM berarti semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah. Atau semakin banyak anak kelompok usia sekolah bersekolah di tingkat pendidikan tertentu.

Pembangunan sektor pendidikan mutlak dilakukan, karena secara langsung berpengaruh terhadap hidup dan kehidupan manusia. Pendidikan secara hakiki menjadi menjadi bagian yang tidak terpisahkan oleh berbagai kebutuhan dasar manusia. Oleh karena itu, pendidikan merupakan hajat orang banyak²⁸. Menurut Isjoni dengan adanya pembangunan pendidikan akan mengurangi kebodohan, ketertinggalan dan akan menciptakan suatu masyarakat yang berilmu pengetahuan, serta mampu mengangkat sendi-sendi kehidupan yang sejatara²⁹.

²⁷<http://bps.go.id/Subjek/view/id/28#subjekViewTab1accordion-daftar-subjek1>, diakses pada tanggal 26 Maret 2015

²⁸Isjoni, *op. cit.*, p.55

²⁹*Ibid.*, p.46

2. Biaya Pendidikan

Biaya pendidikan merupakan komponen masukan instrumental (instrument input) yang sangat penting dalam menyiapkan SDM melalui penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Dalam arti luas biaya adalah pengorbanan sumber ekonomis dan diukur dalam satuan. Pengorbanan ini dapat digolongkan menjadi yang telah terjadi dan kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu³⁰. Mardiasmo menyatakan bahwa biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dengan satuan uang yang telah terjadi atau kemungkinan akan terjadi untuk obyek atau tujuan tertentu³¹.

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa ada 3 unsur pokok yang terkandung dalam definisi biaya yaitu: (1) biaya merupakan pengorbanan atau penggunaan sumber ekonomi, (2) diukur dalam satuan uang, (3) pengorbanan tersebut untuk tujuan tertentu.

Menurut Mulyasa sumber keuangan dan pembiayaan sekolah dapat dikelompokkan atas tiga sumber yaitu:

- a) Pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah.
- b) Orangtua atau peserta didik
- c) Masyarakat, baik mengikat maupun tidak mengikat³².

Supriadi mengelompokkan biaya pendidikan menjadi beberapa kategori, yaitu:

- a) Biaya langsung (*direct cost*) dan Biaya Tidak Langsung (*indirect cost*).
- b) Biaya pribadi (*private cost*) dan biaya social (*social cost*)
- c) Biaya dalam bentuk uang (*monetary cost*) dan biaya bukan uang (*non monetary cost*)

³⁰Mulyadi, *Akuntansi Biaya Edisi ke-5* (Yogyakarta: Bagian Penerbit STIE YKPN, 1993), p.8

³¹Mardiasmo, *Akuntansi Biaya Edisi ke-1* (Yogyakarta: Andi Offset, 1994), p.9

³²Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, strategi dan Implementasi* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2011), p.48

d) Biaya rutin (*routine/recurrent cost*) dan biaya investasi/pembangunan (*investment/development cost*)³³.

Biaya langsung adalah semua biaya yang secara langsung menunjang penyelenggaraan pendidikan, sedangkan biaya tidak langsung yaitu umumnya meliputi hilangnya pendapatan siswa karena sedang mengikuti pendidikan atau lebih dikenal sebagai *learning forgone by student*³⁴.

Biaya pribadi merupakan biaya yang dikeluarkan keluarga untuk pendidikan atau dikenal juga pengeluaran rumah tangga. Sedangkan biaya sosial adalah biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat untuk pendidikan, baik melalui sekolah maupun pajak yang dihimpun oleh pemerintah kemudian digunakan untuk membiayai pendidikan.

Biaya dalam bentuk uang adalah nilai pengorbanan yang terwujud dalam pengeluaran uang. Sedangkan biaya dalam bentuk buka uang adalah nilai pengorbanan yang tidak diwujudkan dengan pengeluaran uang seperti biaya yang diperhitungkan saat seorang siswa tidak mengambil kesempatan waktu senggangnya untuk bersenang-senang tetapi digunakan untuk membaca buku.

Biaya rutin adalah biaya yang harus dikeluarkan dari tahun ke tahun³⁵. Jenis biaya ini yang dikeluarkan secara berulang-ulang (*recurrent cost*). Pengeluaran ini meliputi pengeluaran untuk keperluan sehari-hari seperti alat tulis kantor, buku wajib sekolah, listrik, telepon, gas, air dan benda-

³³Dedi Supriadi, *Satuan Biaya Pendidikan, Dasar dan Menengah* (Bandung: Rosda Karya, 2010), p.38

³⁴Moch. Idochi Anwar, *Administrasi Pendidikan dan Manajemen Biaya Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2003), p.142

³⁵*Ibid*, p.143

benda pos yang secara umum merupakan barang-barang habis pakai. Biaya modal adalah biaya pembangunan adalah jenis biaya yang bersifat pengeluarannya tidak berulang-ulang³⁶. Pengeluaran ini meliputi barang dan jasa yang digunakan dalam waktu yang relatif lama (setahun lebih) seperti pembelian dan pengembangan tanah, gedung sekolah, kelas, laboratorium dan peralatan yang tetap, peralatan pengajaran yang tahan lama, pelayanan kesejahteraan seperti pelayanan rumah dinas dan sebagainya.

Pembiayaan pendidikan pada dasarnya menitikberatkan upaya pendistribusian benefit pendidikan dan beban yang harus ditanggung masyarakat. Hal yang penting dalam pembiayaan pendidikan adalah berupa besar uang yang harus dibelanjakan, darimana sumber uang yang diperoleh dan kepada siapa uang harus dibelanjakan. Dikutip dari Mulyono, Nanang Fattah mengatakan pembiayaan pendidikan adalah jumlah uang yang dihasilkan dan dibelanjakan untuk berbagai keperluan penyelenggaraan pendidikan yang mencakup gaji guru, peningkatan profesional guru, pengadaan peralatan, pengadaan alat-alat dan buku pelajaran, alat tulis kantor, kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan pengelolaan pendidikan dan supervise pendidikan³⁷.

Dalam UU Sisdiknas, terdapat kurang lebih 19 pasal yang menggandengkan kata pemerintah dan pemerintah daerah, yang konotasinya adalah berbagai kebijakan dalam pembangunan pendidikan hendaknya selalu mengawinkan kepentingan nasional dan kepentingan daerah sehingga

³⁶*Ibid*, p.147

³⁷Mulyono, *Manajemen Administrasi dan Organisasi Pendidikan*, (Yogyakarta: Ar: Ruzz Media,2008), p. 113

kualitas pendidikan yang diharapkan dapat meningkatkan daya saing peserta didik, dilaksanakan secara efisien dan efektif.

Secara singkat dapat disebutkan misalnya dalam UU Sisdiknas pasal 11 ayat 2 yang menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun. Selanjutnya pasal 34 ayat 2 disebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.

Sejak terselenggaranya kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang diatur dalam UU No.22 dan 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, mekanisme pembiayaan pendidikan mengalami perubahan dengan adanya pelimpahan wewenang oleh pemerintah kepada pemerintah daerah. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa daerahlah yang lebih mengetahui kebutuhan dan standar pelayanan bagi masyarakat di daerahnya³⁸.

3. Dana Alokasi Khusus Untuk Pendidikan

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan salah satu mekanisme transfer keuangan Pemerintah Pusat ke daerah yang bertujuan antara lain untuk meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana fisik daerah sesuai prioritas nasional serta mengurangi kesenjangan laju pertumbuhan antardaerah dan pelayanan antarbidang³⁹. DAK dimaksudkan untuk membantu membiayai

³⁸ R.Widodo Triputro, *Pembaharuan Otonomi Daerah*, (STPMD,2005)

³⁹ Lembaga Penelitian SMERU, *Mekanisme dan Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK)*, 2008

kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar nasional yang diharapkan⁴⁰.

DAK dialokasikan dari APBN kepada daerah tertentu untuk membantu membantu membiayai kebutuhan khusus, dengan memperhatikan tersedianya dana dalam APBN. Yang dimaksudkan sebagai daerah tertentu adalah daerah yang mempunyai kebutuhan yang bersifat khusus. Yang dimaksud kebutuhan khusus adalah⁴¹:

- a. Kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan secara umum dengan menggunakan rumus alokasi umum, dan/atau kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan secara umum dengan rumus, kebutuhan yang bersifat khusus tidak sama dengan kebutuhan Daerah lain, misalnya kebutuhan di kawasan transmigrasi, dan kebutuhan beberapa jenis investasi/prasarana baru, pembangunan jalan di kawasan daerah terpencil, saluran irigasi primer, dan saluran drainase primer.
- b. Kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional, termasuk antara lain proyek yang dibiayai donor, pembiayaan reboisasi Daerah dan proyek-proyek kemanusiaan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia.

Pemerintah menetapkan DAK untuk suatu daerah dengan memperhatikan kriteria tertentu, meliputi; a) Kriteria umum, ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); b) Kriteria khusus, ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan karakteristik daerah; dan c) Kriteria teknis, ditetapkan oleh kementerian negara/ departemen teknis.

⁴⁰Depdiknas, *Rencana Strategis Depdiknas*, 2005

⁴¹Deddy Supriady Bratakusumah *et al.*, *op.cit.*, p.188

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 bidang-bidang yang didanai DAK adalah⁴²:

1. Khusus tahun 2010, bidang DAK telah ditetapkan meliputi:
 - a) Pendidikan, b) Kesehatan, c) Infrastruktur Jalan, d) Infrastruktur Irigasi, e) Infrastruktur Air Minum, f) Infrastruktur Sanitasi, g) Prasarana Pemerintahan Daerah, h) Kelautan dan Perikanan, i) Pertanian, j) Lingkungan Hidup, k) Keluarga Berencana, l) Kehutanan, m) Sarana dan Prasarana Pedesaan, dan n) Sarana Perdagangan.
2. Pada tahun-tahun selanjutnya bidang kegiatan yang didanai DAK akan ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun anggaran bersangkutan.

Dalam pelaksanaannya, DAK dialokasikan untuk kegiatan pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan/atau perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat di berbagai macam bidang, antara lain yaitu bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan lain-lain.

DAK bidang pendidikan bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan pendidikan yang transparan, profesional, dan bertanggung jawab melibatkan masyarakat secara aktif; mendorong masyarakat untuk ikut mengawasi kegiatan pendidikan secara langsung; dan menggerakkan perekonomian masyarakat bawah. Dana Alokasi Khusus ini apabila dikelola dengan baik, dapat memperbaiki mutu pendidikan, dan paling tidak mengurangi kerusakan infrastruktur. Hal ini sangat penting untuk menanggulangi kemiskinan dan membangun perekonomian nasional yang lebih berdaya saing.

Dapat disimpulkan dari beberapa definisi di atas DAK bidang pendidikan adalah dana yang bersumber dari APBN dan dialokasikan kepada daerah

⁴²Perpres RI, *Rencana pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014*

tertentu untuk membantu membiayai kegiatan pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan/atau perbaikan sarana dan prasarana fisik.

3. Dana Dekonsentrasi Untuk Pendidikan

Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi⁴³. Berdasarkan UU No 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menegaskan bahwa penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Pusat yang dilaksanakan oleh perangkat Daerah Propinsi dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dibiayai atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan penyelenggaraan tugas Pemerintah Pusat yang dilaksanakan oleh perangkat Daerah dan Desa dalam rangka Tugas Pembantuan dibiayai atas beban APBN.

Pendanaan dana dekonsentrasi mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah serta besaran pendanaan yang tersedia bagi penyelenggaraan dekonsentrasi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi, proses perencanaan dan penganggaran dana dekonsentrasi terhadap program dan kegiatan yang akan didekonsentrasikan/ditugaskan disusun dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara, keseimbangan pendanaan di daerah, dan kebutuhan pembangunan di daerah.

⁴³Nota Keuangan dan RAPBN 2011

Pada sektor pendidikan, pelimpahan kewenangan dan anggaran yang terkait dengan dekonsentrasi dilakukan oleh Depdikbud kepada gubernur yang pelaksanaannya diserahkan oleh gubernur kepada Dinas Pendidikan tingkat provinsi.

Dapat disimpulkan bahwa Dana Dekonsentrasi untuk pendidikan adalah dana yang bersumber dari APBN yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi untuk kegiatan yang bersifat non fisik.

4. Pendapatan Perkapita

“Pendapatan perkapita merupakan salah satu indikator yang penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah dalam periode tertentu, yang ditunjukkan dengan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan⁴⁴. Secara umum Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat diartikan sebagai nilai akhir barang-barang dan jasa yang diproduksi di dalam suatu daerah selama periode tertentu umumnya satu tahun. PDRB diyakini sebagai indikator ekonomi terbaik dalam menilai perkembangan ekonomi suatu daerah. Perhitungan pendapatan daerah ini mempunyai ukuran mikro tentang kondisi suatu daerah. Pada umumnya perbandingan kondisi antar daerah dapat dilihat dari pendapatan daerahnya sebagai gambaran.

Pendapatan daerah menggambarkan tingkat produksi daerah yang dicapai dalam satu tahun tertentu dan perubahannya dari tahun ke tahun. Maka ia

⁴⁴Todaro, *Pembangunan Ekonomi, Terjemahan oleh Haris Munandar*. (Jakarta: Erlangga, 2006) p.79

mempunyai peranan penting dalam menggambarkan (i) tingkat kegiatan ekonomi yang dicapai, dan (ii) perubahan pertumbuhannya dari tahun ke tahun.

Gambaran secara menyeluruh tentang kondisi perekonomian suatu daerah dapat diperoleh dari PDRB. Pada dasarnya PDRB merupakan “Jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan dari seluruh sektor perekonomian di wilayah tertentu”. Sedangkan menurut Robinson, PDRB atas dasar harga pasar adalah “Jumlah nilai tambah bruto (*gross value added*) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di wilayah tersebut”⁴⁵.

Suatu daerah yang memiliki potensi dari sektor-sektor yang ada akan memberikan kontribusi yang baik untuk pendapatan daerah tersebut. Sehingga daerah tersebut akan mengalami kemajuan yang cukup pesat. PDRB memiliki kegunaan dalam mengukur suatu daerah, yaitu:

- 1) Mengetahui dan menelaah struktur atau susunan perekonomian. Dari perhitungan PDRB dapat diketahui apakah suatu daerah termasuk daerah industri, pertanian atau jasa dan berapakah besar sumbangan masing-masing sektornya.
- 2) Membandingkan perekonomian dari waktu ke waktu. Oleh karena nilai PDRB dicatat tiap tahun, maka akan di dapat catatan angka dari tahun ke tahun. Dengan demikian diharapkan dapat diperoleh keterangan kenaikan atau penurunan apakah ada perubahan atau pengurangan kemakmuran material atau tidak.

⁴⁵ Robinson Tarigan, *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2005) p. 32

Berdasarkan Badan Pusat Statistik, PDRB dapat dihitung berdasarkan dua harga yang telah ditetapkan pasar, yaitu PDRB harga berlaku dan PDRB harga konstan.

1) PDRB Harga Berlaku

PDRB pada harga berlaku adalah nilai tambah barang-barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu daerah dalam periode tertentu, menurut berdasarkan harga yang berlaku pada periode tersebut serta dapat digunakan untuk melihat struktur ekonomi suatu daerah.

2) PDRB Harga Konstan

PDRB pada harga konstan adalah nilai tambah barang-barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu daerah dalam periode waktu tertentu, berdasarkan harga yang berlaku pada suatu tahun tertentu yang dipakai dasar untuk dipergunakan seterusnya dalam menilai barang-barang dan jasa yang dihasilkan pada periode /tahun berikutnya serta dapat digunakan untuk melihat pertumbuhan ekonomi di suatu daerah.

Dalam perhitungan pendapatan regional hampir sama dengan perhitungan nasional. Perhitungan nasional dapat dilakukan melalui tiga metode, yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, pendekatan pengeluaran. Sedangkan perhitungan regional dilakukan dengan empat metode, yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, pendekatan pengeluaran dan metode alokasi.

1) Pendekatan Produksi

PDRB adalah jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi yang berada di suatu wilayah/provinsi dalam jangka waktu tertentu (satu tahun).

2) Pendekatan Pendapatan

Pendekatan dengan cara ini dapat dilakukan dengan menjumlahkan pendapatan, yaitu jumlah balas jasa faktor produksi berupa upah/gaji, bunga netto, sewa tanah dan keuntungan, sehingga diperoleh Produk Domestik Regional Netto atas dasar biaya faktor. Untuk memperoleh Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar, harus ditambah dengan penyusutan dan pajak tidak langsung netto. Perhitungan dengan pendekatan pendapatan (*income approach*) ini biasanya digunakan untuk kegiatan yang sulit dihitung dengan pendekatan produksi, seperti sektor permintaan dan jasa-jasa yang usahanya tidak mencari untung. Dengan demikian maka item-item yang disajikan menjadi:

- a) Upah/gaji
- b) Pendapatan dari usaha perseorangan
- c) Sewa tanah
- d) Keuntungan
- e) Bunga netto

3) Pendekatan Pengeluaran

Pendekatan dengan cara ini digunakan untuk menghitung nilai barang dan jasa yang digunakan oleh berbagai golongan dalam masyarakat. Barang dan

jasa yang diproduksi oleh unit-unit produksi akan digunakan untuk keperluan konsumsi, pembentukan modal (investasi) dan ekspor.

Nilai barang dan jasa yang berasal dari produksi domestik saja, maka dari komponen biaya-biaya perlu dikurangi dengan nilai impor sehingga komponen nilai ekspor akan menjadi nilai ekspor netto. Apabila nilai konsumsi (konsumsi rumah tangga, pemerintah, dan yayasan sosial), nilai pembentukan modal dan ekspor netto dijumlahkan, maka akan diperoleh nilai Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar. Komponen pengeluaran akhir terdiri dari:

- a. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga
- b. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah
- c. Pembentukan Modal Tetap Bruto
- d. Perubahan Stok
- e. Ekspor Netto

4) Metode Alokasi

Pendekatan dengan cara ini digunakan pada suatu unit produksi yang mempunyai kantor pusat dan kantor cabang. Kantor pusat berada di wilayah lain sedangkan kantor cabang berada di daerah-daerah tersebut. Sering kali kantor-kantor cabang tidak dapat membuat neraca untuk rugi, sebab neracanya dibuat di kantor pusat sehingga tidak dapat diketahui berapa keuntungan yang diperoleh dari kantor cabang ini. Padahal keuntungan adalah salah satu komponen dari nilai tambahnya tidak dapat dihitung.

Produk Domestik Regional Bruto. Mencerminkan tingkat output yang dapat dihasilkan dalam suatu daerah. Dengan demikian PDRB dapat pula mencerminkan tingkat penghasilan suatu masyarakat dalam suatu daerah. Peningkatan PDRB, mengindikasikan bahwa sektor riil di daerah tersebut juga kian tumbuh. Dengan kata lain semakin banyak masyarakat yang memperoleh pekerjaan dan penghasilan. Masyarakat yang memiliki penghasilan akan mampu untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka. Kebutuhan untuk bertransaksi, atau bahkan berinvestasi. Sehingga diharapkan dengan semakin tingginya PDRB suatu daerah dan disertai dengan pemerataan pendapatan akan tercipta masyarakat yang makmur dan sejahtera, serta mampu mencukupi kebutuhan hidup.

B. Hasil Penelitian yang Relevan

Penelitian mengenai pengaruh Dana Alokasi Khusus untuk Pendidikan, Dana Dekonsentrasi untuk pendidikan dan pendapatan perkapita terhadap pembangunan pendidikan telah dilakukan sebelumnya.

1. **Maghfiroh Yenny** Jurnal Kebijakan Ekonomi Pascasarjana FE UI yang berjudul “Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Pembangunan Pendidikan di Indonesia”. Penelitian ini bertujuan melihat bagaimana pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pembangunan pendidikan di Indonesia, dalam hal ini ini adalah Angka Melek Huruf, rasio Murid terhadap Guru dan Angka Partisipasi Murni. Studi dilakukan dalam rentang waktu 10 tahun, dari tahun 1996-2005, yaitu tahun 1996-2000 untuk sebelum desentralisasi dan tahun 2001-2005 untuk setelah

desentralisasi. Penelitian ini menggunakan metode pendugaan persamaan *ordinary least square* (OLS) dengan model regresi data panel. Sebagai variabel independen adalah anggaran bidang pendidikan di tiap kabupaten/kota dan provinsi (APBD), anggaran bidang pendidikan yang dikeluarkan pemerintah pusat (APBN), pengeluaran rumah tangga untuk pendidikan, dan pendapatan per kapita. Sedangkan variabel dependen Angka Melek Huruf, Rasio Murid terhadap Guru, Angka Partisipasi Murni Sekolah Dasar, dan Angka Partisipasi Murni Sekolah Menengah. Dari hasil estimasi diketahui bahwa anggaran pendidikan di daerah (APBD), anggaran pendidikan pemerintah pusat (APBN), berkorelasi positif dan berpengaruh signifikan terhadap Angka Melek Huruf dan Angka Partisipasi Murni. Namun, APBD dan APBN tidak berpengaruh signifikan terhadap rasio murid dan guru. Variabel pengeluaran rumah tangga untuk pendidikan berkorelasi positif dan berpengaruh signifikan dengan Angka Partisipasi Murni. Variabel pendapatan perkapita juga berkorelasi positif dan berpengaruh signifikan dengan Angka Melek Huruf, rasio Murid terhadap guru dan Angka Partisipasi Murni.

2. **Galuh Pramilu Bakti**, Skripsi Universitas Diponegoro, Semarang, 2012 dalam penelitian yang berjudul “Analisis Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Angka Melek Huruf Perempuan dan Angka Partisipasi Sekolah Perempuan di Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan data panel yang dianalisis dengan model *Fixed Effect Methods*. Data yang dipergunakan adalah data sekunder

pendapatan asli daerah, pengeluaran daerah, angka melek huruf perempuan, angka partisipasi sekolah, pendapatan perkapita, populasi penduduk, dan jumlah SMA/MA di kabupaten/kota Provinsi DIY dari tahun 2004-2009. Berdasarkan hasil analisis dari data panel dengan model *Fixed Effect Methods* menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal yang diukur melalui sisi pendapatan dan pengeluaran tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap angka melek huruf perempuan dan angka partisipasi sekolah perempuan di kabupaten/kota Provinsi DIY.

- 3. Mahocca Swangga Purusa dan Hadi Sasana, *Diponegoro Journal Of Economics Volume 2, No.1, 2013*** yang berjudul: “Implikasi Desentralisasi Fiskal Terhadap AKABA dan APM SD/MI di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2010”. Penelitian ini menggunakan data panel yang dianalisis dengan model *Fixed Effect Methods*. Data yang dipergunakan adalah data sekunder rasio total pengeluaran pemerintah daerah terhadap pemerintah provinsi, PDRB berdasarkan harga berlaku, angka kematian balita, angka partisipasi murni, rasio murid perguruan tinggi dari tahun 2007-2010. Berdasarkan hasil analisis dari data panel dengan model *Fixed Effect Methods* menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal yang diukur dari sisi pengeluaran memiliki pengaruh signifikan terhadap angka kematian bayi di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah. Persamaan pengaruh desentralisasi fiskal terhadap APMSD/MI memiliki pengaruh positif yang signifikan. Variabel PDRB perkapita menurut harga berlaku juga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap APMSD/MI.

variabel rasio murid per guru SD/MI dan jumlah guru SD/MI tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap APMSD/MI.

4. **Azwan, M.Surya Hidayat, Syamsuddin** Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah Vol. I No.4, April-Juni 2014 yang berjudul “Analisis Anggaran Pendidikan Provinsi Jambi”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proporsi anggaran pendidikan Jambi, seberapa besar proporsi dana dekonsentrasi dan apakah ada hubungan antara peningkatan anggaran pendidikan dengan APM dan APK. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dalam bentuk time series. Jenis data yang digunakan adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jambi, Dokumen Penggunaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, Master Plan Pendidikan Provinsi Jambi, Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Kasar (APK) dengan menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif dan deskriptif kualitatif. Hasil korelasi menyatakan bahwa APBN/APBD berpengaruh signifikan terhadap APM SD dan APK SMP tetapi tidak berpengaruh signifikan terhadap APK SMA.

C. Kerangka Teoritik

Alokasi dana untuk setiap sektor pembangunan termasuk pendidikan dituangkan dalam rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Meningkatnya alokasi anggaran pendidikan dari pemerintah pusat akan

berdampak pada peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan. Peningkatan mutu pendidikan berkaitan dengan ketersediaan sarana yang baik, fasilitas laboratorium, peralatan, perpustakaan serta buku yang memadai dan yang amat vital adalah ketersediaan tenaga pengajar (guru) yang berkualitas. Sementara pemerataan pendidikan bertujuan untuk memperluas akses agar seluruh masyarakat dapat memperoleh kesempatan pendidikan. Pemerataan pendidikan ini juga berkaitan dengan ketersediaan prasarana (gedung sekolah, ruang kelas/belajar) yang mencukupi⁴⁶.

Ketersediaan prasarana akan meningkatkan pembangunan pendidikan yang dapat dilihat dari angka partisipasi murni pendidikan dasar dan angka melek huruf.

Investasi dalam hal pendidikan mutlak dibutuhkan, oleh karena itu pemerintah harus membangun suatu sarana dan sistem pendidikan yang baik. Alokasi anggaran pengeluaran pemerintah terhadap pendidikan merupakan wujud nyata dari investasi untuk meningkatkan produktivitas masyarakat. Sebelum diberlakukannya kebijakan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah pada tahun 2001, pemerintah kabupaten/kota hanya membiayai pengeluaran jenjang pendidikan sekolah dasar. Sedangkan pemerintah pusat bertanggungjawab membiayai tingkat SLTP, SLTA dan perguruan tinggi. Setelah desentralisasi fiskal dan OTDA mekanisme pembiayaan pendidikan sekolah mengalami perubahan.

⁴⁶ Mulyono, *Konsep Pembiayaan Pendidikan* (Jogjakarta: AR-RUZZ Media, 2010), p.89

Dari sisi penerimaan aliran dana dari pemerintah pusat ke pemerintah kabupaten/kota melalui dana perimbangan sedangkan dari sisi pengeluaran pemerintah kabupaten/kota memiliki keleluasaan dalam merencanakan anggarannya termasuk pembiayaan pada semua tingkat pendidikan kecuali perguruan tinggi sehingga dapat mengalokasikan anggaran sesuai dengan prioritas pembangunan daerahnya.

Oleh karena itu setelah diberlakukannya desentralisasi keberhasilan pendidikan sangat tergantung dari kemampuan pemerintah daerah dalam mengatur dan membiayai sektor pendidikan.

Besarnya biaya yang dikeluarkan oleh rumah tangga untuk pendidikan akan mempengaruhi peningkatan pendidikan di suatu daerah. Dengan begitu banyaknya kebutuhan manusia, maka salah satu pertimbangan keluarga dalam memutuskan pilihan konsumsinya adalah besaran pendapatan. Peran orang tua selama ini cukup besar dalam mendukung pendidikan anak-anaknya. Hal ini disebabkan terdapat ketertarikan moral antara anak dan orang tua, semua orang tua selalu berharap pendidikan anak-anaknya bisa maju. Orang tua yang memiliki pikiran ke depan selalu menempatkan pendidikan anak sebagai tugas sekaligus kewajibannya⁴⁷. Dengan adanya kesadaran dari orang tua untuk menyekolahkan anak tepat waktunya dan mengalokasikan sebagian pendapatannya untuk biaya pendidikan ini akan meningkatkan angka partisipasi sekolah.

⁴⁷Zainuddin, *op.cit* p. 110

Menurut penelitian SMERU, pembangunan pendidikan tidak bisa dibebankan kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah saja, tetapi peran masyarakat (orangtua) juga sangat diperlukan. Pendanaan pendidikan yang bersumber dari peran serta masyarakat diatur dalam Keputusan Mendiknas No. 056/U/2001 tentang Pedoman Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan di Sekolah. Sihombing dalam Zainuddin mengatakan sumber pembiayaan pendidikan itu tidak bisa dipisahkan dari 2 faktor yang saling berkaitan yaitu peran orang tua, pemerintah⁴⁸.

Menurut Dedi Supriadi besar kecilnya biaya pendidikan, terutama pada tingkat satuan pendidikan, berhubungan dengan berbagai indikator mutu pendidikan, seperti angka partisipasi, angka putus sekolah dan tinggal kelas dan prestasi belajar siswa⁴⁹. Pentingnya unsur biaya bagi mutu sekolah juga diungkapkan oleh Nanang Fattah bahwa faktor yang mempengaruhi mutu pendidikan dalam hasil belajar diantaranya adalah biaya⁵⁰.

D. Perumusan Hipotesis

Berdasarkan deskripsi teoritis dan kerangka berfikir yang telah diuraikan diatas, maka peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut:

1. Diduga terdapat pengaruh positif antara Dana Alokasi Khusus untuk pendidikan terhadap Angka Partisipasi Murni Pendidikan Dasar?
2. Diduga terdapat pengaruh positif antara Dana Dekonsentrasi untuk pendidikan terhadap Angka Partisipasi Murni Pendidikan Dasar?

⁴⁸Zainuddin, *op.cit.* p.109

⁴⁹Dedi Supriadi, *Op. Cit.*, h. 7.

⁵⁰Nanang Fattah, *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006), h. 28.

3. Diduga terdapat pengaruh positif antara Pendapatan Perkapita terhadap Angka Partisipasi Murni Pendidikan Dasar?
4. Diduga terdapat pengaruh positif antara Dana Alokasi Khusus untuk pendidikan, Dana Dekonsentrasi untuk pendidikan dan Pendapatan Perkapita terhadap Angka Partisipasi Murni Pendidikan Dasar?

BAB III

METEDOLOGI PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah-masalah yang telah peneliti rumuskan, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah untuk mendapatkan pengetahuan yang tepat dan dapat dipercaya tentang:

1. Seberapa besar pengaruh Dana Alokasi Khusus untuk pendidikan terhadap kualitas Angka Partisipasi Murni Pendidikan Dasar di Indonesia?
2. Seberapa besar pengaruh Dana Dekonsentrasi untuk pendidikan terhadap Angka Partisipasi Murni Pendidikan Dasar di Indonesia?
3. Seberapa besar pengaruh Pendapatan perkapita terhadap Angka Partisipasi Murni Pendidikan Dasar di Indonesia?
4. Seberapa besar pengaruh Dana Alokasi Khusus untuk pendidikan, Dana Dekonsentrasi untuk pendidikan dan Pendapatan perkapita terhadap Angka Partisipasi Murni Pendidikan Dasar di Indonesia?

B. Objek dan Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan mengambil data DAK untuk pendidikan, Dana Dekonsentrasi untuk pendidikan, PDRB, dan Angka Partisipasi Murni (APM) pendidikan dasar. Indonesia dipilih karena memiliki kualitas pembangunan pendidikan yang masih rendah.

Rentang waktu penelitian ini selama lima tahun dari tahun 2009 sampai 2013.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *Ex Post Facto* dengan pendekatan korelasional. *Ex Post Facto* adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk meneliti peristiwa yang telah terjadi dan kemudian meruntut ke belakang untuk mengetahui faktor-faktor yang menimbulkan kejadian tersebut. Metode ini digunakan untuk memperoleh data sekunder⁵¹.

Pendekatan korelasional yang dilakukan adalah dengan menggunakan regresi linier berganda (*multiple linier reresion*), disebut regresi berganda karena banyak faktor atau variabel yang mempengaruhi variabel terikat. Regresi linear berganda (*multiple linier regresion*) ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari variabel-variabel yang akan diteliti.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Sumber data diperoleh dari data publikasi yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Keuangan, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa DAK untuk pendidikan tiap provinsi dan kabupaten/kota, anggaran Dana Dekonsentrasi

⁵¹Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Jakarta: Alfabeta, 2004), p.7

untuk pendidikan tiap provinsi, PDRB di tiap provinsi, dan angka partisipasi murni sekolah.

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan *pooling data* atau disebut juga data panel, dimana data *time series* (runtut waktu) dan data *cross section* (deret lintang) digabungkan sehingga jumlah observasi menjadi jumlah tahun dikalikan dengan jumlah provinsi. Data *time series* adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu terhadap suatu individu, sedangkan *cross section* adalah data yang dikumpulkan dalam satu waktu terhadap banyak individu⁵². Data *time series* 5 tahun, dari tahun 2009-2013 dan data *cross section* sebanyak 33 provinsi di Indonesia yang menghasilkan 165 observasi.

E. Operasionalisasi Variabel Penelitian

Operasionalisasi variabel penelitian diperlukan untuk memenuhi jenis dan indikator dari variabel-variabel yang terkait dalam penelitian ini. Selain itu, proses ini dimaksudkan untuk menentukan skala pengukuran dari masing-masing variabel sehingga pengujian hipotesis dengan alat bantu statistik dapat dilakukan secara luas.

a. Pembangunan Pendidikan

1. Definisi Konseptual

Pembangunan pendidikan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas masyarakat melalui pendidikan.

⁵²Nachrowi, *Pendekatan Populer dan Praktis Ekomometrika untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan*, (Jakarta:LPFE UI, 2006), p.309

2. Definisi Operasional

Variabel Pembangunan pendidikan dalam penelitian ini diukur dengan *net school enrollment* (angka partisipasi sekolah murni) untuk tingkat pendidikan dasar yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

b. Dana Alokasi Khusus Sektor Pendidikan

1. Definisi Konseptual

Dana Alokasi Khusus untuk pendidikan adalah dana yang bersumber dari APBN dan dialokasikan kepada daerah tertentu untuk membantu membiayai kegiatan pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan/atau perbaikan sarana dan prasarana fisik

2. Definisi Operasional

Variabel Dana Alokasi Khusus sektor pendidikan yang digunakan dalam pada penelitian ini adalah data DAK untuk pendidikan tiap provinsi kab/kota yang diperoleh dari Kementerian Keuangan bagian Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK).

c. Dana Dekonsentrasi Sektor Pendidikan

1. Definisi Konseptual

Dana Dekonsentrasi sektor pendidikan adalah dana yang bersumber dari APBN yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi untuk kegiatan yang bersifat non fisik.

2. Definisi Operasional

Variabel Dana Dekonsentrasi sektor pendidikan yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Dana Dekonsentrasi untuk pendidikan tiap provinsi yang diperoleh dari Kementerian Keuangan bagian Direktorat Jenderal Anggaran (DJA).

d. Pendapatan per Kapita

1. Definisi Konseptual

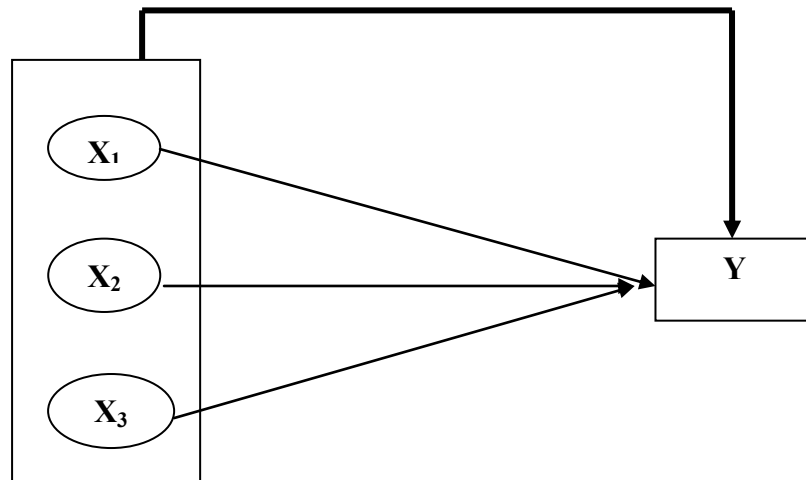
Pendapatan (PDRB) perkapita menggambarkan rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun.

2. Definisi Operasional

Variabel Pendapatan perkapita yang digunakan dalam penelitian ini adalah data PDRB perkapita tanpa migas atas dasar harga konstan 2000 tiap provinsi yang diperoleh dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS).

F. Konstelasi Pengaruh Antar Variabel

Dalam Penelitian ini terdapat 5 variabel yang menjadi objek penelitian dimana Angka Partisipasi Murni merupakan variabel terikat satu . Sedangkan variabel-variabel bebas adalah DAK sektor Pendidikan (X1), Dana Dekonsentrasi untuk Pendidikan (X2), Pendapatan Perkapita (X3). Konstelasi pengaruh antar variabel di atas dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar III.1

Konstelasi Hubungan Antar Variabel

Keterangan:

Variabel Bebas (X1) : DAK untuk pendidikan

Variabel Bebas (X2) : Dana Dekonsentrasi untuk pendidikan

Variabel Bebas (X3) : Pendapatan perkapita

Variabel Terikat(Y) : Angka Partisipasi Murni untuk jenjang pendidikan
dasar (SD, SMP)

→ : Menunjukkan Arah Pengaruh

G. Teknik Analisis Data

1. Metode Analisis

a. Analisis Data Panel

Model ini menggabungkan observasi deret lintang dan runtun waktu sehingga jumlah observasi meningkat. Estimasi panel data akan meningkatkan derajat kebebasan, mengurangi kolinearitas antara variabel penjelas dan memperbaiki efisiensi estimasi. Verbeek dikutip dalam Winarno mengemukakan bahwa keuntungan regresi dengan data panel adalah kemampuan regresi data panel dalam mengidentifikasi parameter-parameter regresi secara pasti tanpa asumsi restriksi atau kendala⁵³. Menurut Baltagi, keunggulan penggunaan data panel dibanding data runtun waktu dan data deret lintang adalah:

1. Estimasi data panel dapat menunjukkan adanya heterogenitas dalam tiap unit.
2. Dengan data panel, data lebih informatif, mengurangi kolinieritas antara variabel, meningkatkan derajat kebebasan dan lebih efisien.
3. Data panel cocok digunakan untuk menggambarkan adanya dinamika perubahan.
4. Data panel dapat lebih mampu mendeteksi dan mengukur dampak.
5. Data panel bisa digunakan untuk studi dengan model yang lebih lengkap.
6. Data panel dapat meminimumkan bias yang mungkin dihasilkan dalam regresi.

⁵³Wing Wahyu Winarno, *Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan Eviews Edisi Ke-3*, (Yogyakarta; STIM YKPN, 2011). P.1.2

Dalam model panel data, persamaan model dengan menggunakan data *cross section* dapat ditulis sebagai berikut:

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + \beta_2 X_i + \beta_3 X_i; i = 1, 2, \dots, N$$

dimana N adalah banyaknya data *cross section*, sedangkan persamaan model dengan *time series* adalah

$$Y_t = \beta_0 + \beta_1 X_t + \beta_2 X_t + \beta_3 X_i; t = 1, 2, \dots, T$$

dimana T adalah banyaknya data *time-series*:

Mengingat data panel merupakan gabungan dari *time series* dan *cross section*, maka model dapat ditulis dengan :

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{it} + \beta_2 X_{it} + \beta_3 X_{it} + \mu_{it}$$

$$i = 1, 2, \dots, N; t = 1, 2, \dots, T$$

Model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$APMPD = \beta_0 + \beta_1 DAK_{it} + \beta_2 DEKON_{it} + \beta_3 YC_{it} + \mu_{it}$$

Model tersebut dapat ditransformasikan kedalam persamaan logaritma natural menjadi:

$$APMPD = \beta_0 + \beta_1 \ln DAK + \beta_2 \ln DEKON + \beta_3 \ln YC + \mu$$

Keterangan:

APMPD = Angka Partisipasi Murni Pendidikan Dasar

β_0 = konstanta

β_1 = koefisien konstanta untuk variabel Dana Alokasi Khusus (DAK)

DAK = DAK sektor pendidikan di provinsi i pada tahun t

β_2 = koefisien konstanta untuk variabel Dana Dekonsentrasi

DEKON = Dana Dekonsentrasi sektor pendidikan di provinsi pada tahun t

β_3 = koefisien konstanta untuk variabel Pendapatan perkapita

PDRB = PDRB perkapita di provinsi i pada tahun t

I = banyaknya data deret lintang, dalam hal ini adalah provinsi, $i = 1, 2, \dots, N$

t = banyaknya deret waktu, $t = 1, 2, \dots, N$

μ = kesalahan pengganggu

\ln = Logaritma Natural

b. Estimasi Model

Dalam data panel terdapat Dalam data panel, terdapat tiga spesifikasi model yang mungkin digunakan, yakni model *common effects*, *fixed effects*, dan *random effects*. Pada kesempatan ini peneliti akan melakukan uji tahap demi tahap untuk memilih model mana yang paling sesuai. Ketiga model tersebut, yaitu:

1) Model *Common Effect*

Model *common effects* atau *pooled regression* merupakan model regresi data panel yang paling sederhana. Model ini pada dasarnya mengabaikan struktur panel dari data, sehingga diasumsikan bahwa perilaku antar individu sama dalam berbagai kurun waktu atau dengan kata lain pengaruh spesifik dari masing-masing individu diabaikan atau dianggap tidak ada. Dengan demikian, akan dihasilkan sebuah persamaan regresi yang sama untuk setiap unit cross section. Sesuatu yang secara realistis tentunya kurang dapat

diterima. Karena itu, model ini sangat jarang digunakan dalam analisis data panel.

Berdasarkan asumsi struktur matriks varians-covarians residual, maka pada model *common effects*, terdapat 4 metode estimasi yang dapat digunakan, yaitu:

- a) *Ordinary Least Square (OLS)*, jika struktur matriks varians kovarians residualnya diasumsikan bersifat homoskedatik dan tidak ada *cross sectional correlation*.
- b) *General Least Square (GLS)/ Weight Least Square (WLS): Cross Sectional Weight*, jika struktur matriks varians-kovarians residual diasumsikan bersifat heteroskedastik dan tidak ada *cross sectional correlation*,
- c) *Feasible Generalized Least Square (FGLS)/ Seemingly Uncorrelated Regression (SUR)* atau *Maximum Likelihood Estimator (MLE)*, jika struktur matriks varians-kovarians residual diasumsikan bersifat heterokedastik dan ada *cross sectional correlation*,
- d) *Feasible Generalized Least Square (FGLS)* dengan proses *autoregressive (AR)* pada error term-nya, jika struktur matriks varians-kovarians residualnya diasumsikan bersifat heteroskedastik dan ada korelasi antar waktu pada residualnya.

2) Model Fixed Effect

Jika model *common effects* cenderung mengabaikan struktur panel dari data dan pengaruh spesifik masing-masing individu, maka model *fixed*

effects adalah sebaliknya. Pada model ini, terdapat efek spesifik individu α_i dan diasumsikan berkorelasi dengan variabel penjelas yang teramati X_{it} .

Berdasarkan asumsi struktur matriks varians-kovarians residual, maka pada model *fixed effects*, terdapat 3 metode estimasi yang dapat digunakan, yaitu :

- a) *Ordinary Least Square (OLS/LSDV)*, jika struktur matriks varianskovarians residualnya diasumsikan bersifat homoskedastik dan tidak ada *cross sectional correlation*.
- b) *Weighted Least Square (WLS)*, jika struktur matriks varianskovarians residualnya diasumsikan bersifat heteroskedastik dan tidak ada *cross sectional correlation*.
- c) *Seemingly Uncorrelated Regression (SUR)*, jika struktur matriks varians-kovarians residualnya diasumsikan bersifat heteroskedastik dan ada *cross sectional correlation*.

3) Model Random Effect

Pendekatan ini mengasumsikan *unobservable individual effects* (u_{it}) tidak berkorelasi dengan *regressor* (X) atau dengan kata lain u_{it} diasumsikan bersifat random. Sebelum model diestimasi dengan model yang tepat, terlebih dahulu dilakukan uji spesifikasi apakah *fixed effects* atau *random effects* atau keduanya memberikan hasil yang sama.

2. Uji Metode Estimasi data panel

Sebelum menentukan metode estimasi data panel yang akan digunakan dalam penelitian ini, maka harus dilakukan beberapa pengujian. Untuk

menentukan apakah model panel data dapat diregresi dengan metode *Common Effects*, metode *Fixed Effects* (FE) atau metode *Random Effects* (RE), maka dilakukan uji-uji sebagai berikut:

a) Uji Chow

Uji Chow dapat digunakan untuk memilih teknik dengan metode pendekatan *Pooled Least Square* (PLS) atau metode *Fixed Effects* (FE). Prosedur Uji Chow adalah sebagai berikut:

Buat hipotesis dari Uji Chow

- Apabila probabilitas dari *cross section* $F > 0,05$ = model *Common Effects*
- Apabila probabilitas dari *cross section* $F < 0,05$ = model *Fixed Effects*

b) Uji Hausman

Uji Hausman digunakan untuk memilih antara metode pendekatan *Fixed Effects* (FE) atau *Random Effects* (RE). Prosedur Uji Hausman adalah sebagai berikut:

- a. Buat hipotesis dari Uji Hausman: =*random effects* dan =*fixed effects*.
- b. Menentukan kriteria uji: apabila *Chi-square* statistik $>$ *Chi-square* tabel dan *p-value* signifikan, maka hipotesis ditolak, sehingga metode FE lebih tepat untuk digunakan. Apabila *Chi-square* statistik $<$ *Chi-square* tabel dan *p-value* signifikan, maka hipotesis diterima, sehingga metode RE lebih tepat untuk digunakan.

3. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah residual berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas residual metode OLS secara formal dapat dideteksi dari metode yang dikembangkan oleh Jarque-Bera (JB). Metode JB ini didasarkan pada sampel besar yang diasumsikan bersifat *asymptotic*. Uji statistik dari J-B ini menggunakan perhitungan *skewness* dan *kurtosis*. Adapun formula uji statistik J-B adalah sebagai berikut:

$$JB = n \left[\frac{S^2}{6} + \frac{(K - 3)^2}{24} \right]$$

Keterangan S = koefisien *skewness* dan K = koefisien *kurtosis*

Hipotesis

- Ho : Error berdistribusi normal
- H1 : Error tidak berdistribusi normal

Statistik pengujian : Jarque-Bera

Alfa pengujian : 5%

Jika hasil perhitungan menunjukkan p-value Jarque-Bera > 0,05 maka H0 diterima, artinya eror mengikuti fungsi distribusi normal⁵⁴.

⁵⁴Wing Wahyu Winarno, *Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan Eviews* (Yogyakarta ,UPP STIM YKPN,2009),p.5.37

b. Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi tidak terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain.

Hipotesis

- Ho : Varians error bersifat homoskedastisitas
- H1 : Varians error bersifat heteroskedastisitas

Statistik pengujian : Uji White

Alfa pengujian : 5%

Jika hasil p-value Prob. Chi Square $> 0,05$ maka H0 diterima, artinya varians error bersifat homoskedastisitas.

4. Uji Hipotesis

a. Uji t

Uji t untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen, apakah pengaruhnya signifikan atau tidak⁵⁵. Selain itu, uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Dengan uji statistik t maka dapat diketahui apakah pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen sesuai hipotesis atau tidak.

⁵⁵Duwi Priyanto, *op. cit.*, p.50

1) Hipotesis pengujian :

$$H_0 : \beta_1 < 0$$

$$H_1 : \beta_1 > 0$$

Alpha pengujian 5% (0,05)

Kriteria pengujian:

- a) Jika $p\text{-value} > 0,05$, H_0 ditolak, maka variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikan
- b) Jika $p\text{-value} < 0,05$, H_0 diterima, maka variabel independen tidak mempengaruhi variabel dependen secara signifikan.

b. Uji F

Uji F atau uji koefisien regresi secara serentak, yaitu untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara serentak terhadap variabel dependen, apakah pengaruhnya signifikan atau tidak⁵⁶. Hipotesis penelitiannya:

$$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$$

Artinya variabel X_1 , X_2 dan X_3 secara serentak tidak berpengaruh terhadap Y .

$$H_1 : \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq 0$$

Artinya variabel X_1 , X_2 dan X_3 secara serentak berpengaruh terhadap Y .

Alpha pengujian 5% (0,05)

Kriteria pengambilan keputusannya, yaitu:

- a. $F_{\text{statistik}} \leq 0,05$, maka H_0 diterima
- b. $F_{\text{statistik}} > 0,05$, maka H_0 ditolak

⁵⁶Duwi Prayitmo, *SPSS Analisa Korelasi, Regresi dan Multivariate*, (Yogyakarta: Gava Media, 2009), p.48

c. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Nilai koefisien determinasi untuk mengetahui besarnya presentasi variabel terikat yang disebabkan oleh variabel bebas. Dengan kata lain, koefisien determinasi menunjukkan ragam naik turunnya Y yang diterangkan oleh pengaruh linier X. Dalam hal ini ragam naik turunnya Y seluruhnya disebabkan oleh X. Perhitungan koefisien determinasi dapat dihitung dengan rumus⁵⁷:

$$R^2 = \frac{EES}{TSS}$$

Keterangan :

EES (*Explained of Sum Squared*) = Jumlah kuadrat yang dijelaskan

TSS (*Total Sum of Squares*) = Total jumlah kuadrat

Dimana nilai R^2 terletak diantara 0 sampai dengan 1, nilai $0 \leq R^2 \leq 1$. Jika $R^2 = 0$, berarti variabel bebas tidak bisa menjelaskan variabel perubahan variabel terikat, maka model dapat dikatakan buruk. Jika $R^2 = 1$, berarti variabel bebas mampu menjelaskan variabel perubahan variabel terikat dengan sempurna. Kondisi seperti dua hal tersebut hampir sulit diperoleh. Kecocokan model dapat dikatakan lebih baik kalau R^2 semakin dekat dengan 1.

⁵⁷Nachrowi Djalal Nachrowi, *Penggunaan Teknik Ekonometrika* (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2008), p.22

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

Deskripsi data hasil penelitian dimaksudkan untuk menyajikan gambaran umum mengenai data yang akan diolah dari lima variabel dari penelitian ini. Variabel terikat itu sendiri adalah Angka Partisipasi Sekolah Murni Pendidikan Dasar sedangkan variabel bebas terdiri dari tiga variabel, yaitu Dana Alokasi Khusus untuk Pendidikan (X1), Dana Dekonsentrasi Untuk Pendidikan (X2) dan Pendapatan Perkapita (X3).

1. Angka Partisipasi Murni Pendidikan Dasar

Penelitian ini menggunakan data Angka Partisipasi Sekolah Murni (APM) Sekolah pendidikan dasar yang diperoleh dari Kemendikbud berdasarkan 33 provinsi yang ada di Indonesia. Data APM sekolah pendidikan dasar ini merupakan presentase dari jumlah siswa kelompok usia sekolah di jenjang tertentu dibagi jumlah penduduk kelompok usia tertentu. Untuk kelompok usia APM pendidikan dasar mulai dari umur 7-15 tahun

Tabel IV. 1
Angka Partisipasi Murni Pendidikan Dasar Berdasarkan Beberapa
Provinsi di Indonesia

Provinsi		Tahun (%)				
		2009	2010	2011	2012	2013
Tertinggi	DKI JAKARTA	93.83	93.35	93.77	95.67	96.81
	DIY	92.80	92.05	93.90	94.41	94.82
	KEPRIAU	89.80	88.12	79.29	81.90	92.36
Terendah	PAPBAR	74.23	73.99	75.33	76.02	76.50
	NTT	76.26	75.90	77.03	80.01	80.31
	PAPUA	77.16	76.56	76.45	76.70	77.05

Sumber: Kementerian Pendidikan & Kebudayaan, data diolah

Data pada tabel IV.1 menunjukkan beberapa provinsi dengan angka partisipasi sekolah murni pendidikan dasar tertinggi dan terendah. Angka partisipasi sekolah murni pendidikan dasar tertinggi terdapat pada provinsi DKI Jakarta tahun 2009 sebesar 93.83 persen kemudian berfluktuasi yang cenderung meningkat sampai dengan tahun 2013 menjadi 96.81 persen. Daerah Istimewa Yogyakarta menduduki urutan kedua tertinggi untuk angka partisipasi sekolah murni pendidikan dasar pada tahun 2009 sebesar 92.80 persen dan tahun 2013 mengalami kenaikan menjadi 94.82 persen. Provinsi dengan urutan tertinggi ketiga yaitu Kep. Riau pada tahun 2009 sebesar 89.80 persen dan tahun 2013 mengalami kenaikan menjadi 92.36 persen.

Data pada tabel IV.1 juga menunjukkan tiga provinsi dengan angka partisipasi sekolah murni pendidikan dasar terendah adalah pada provinsi Papua Barat, Nusa

Tenggara Timur dan Papua. Angka partisipasi sekolah murni pada provinsi Papua Barat tahun 2009 adalah sebesar 74.23 persen dan mengalami kenaikan sampai dengan pada tahun 2013 menjadi 76.50 persen meskipun pada tahun 2010 mengalami penurunan. Angka partisipasi sekolah murni pendidikan dasar terendah kedua adalah provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2009 sebesar 76.26 persen dan mengalami kenaikan pada tahun 2013 menjadi 80.31 persen. Provinsi dengan urutan terendah ketiga adalah provinsi Papua sebesar 77.16 persen dan pada tahun 2013 mengalami penurunan menjadi 77.05 persen.

Tabel IV. 2
Angka Partisipasi Murni Pendidikan Dasar Berdasarkan
Wilayah/Pulau di Indonesia

Wilayah/Pulau	Tahun (%)				
	2009	2010	2011	2012	2013
Sumatera	17.14	17.08	16.97	17.06	17.27
Jawa	17.63	17.73	17.98	17.81	17.68
Bali dan Nusa Tenggara	16.12	16.27	16.42	16.47	16.36
Kalimantan	16.12	16.27	16.42	16.47	16.36
Sulawesi	16.38	16.21	16.26	16.32	16.27
Maluku dan Papua	15.98	16.03	16.23	16.17	16.06

Sumber: Kementerian Pendidikan & Kebudayaan RI, data diolah

Berdasarkan data pada tabel IV.2 dapat dilihat bahwa angka partisipasi murni pendidikan dasar tertinggi berdasarkan 6 wilayah/pulau di Indonesia selama lima tahun terdapat pada pulau Jawa dengan persentase 17.63 persen pada tahun 2009 dan berfluktuasi sampai tahun 2013 menjadi 17.68 persen. Urutan kedua tertinggi tingkat partisipasi murni pendidikan dasar adalah pulau Sumatera dengan angka partisipasi murni pendidikan dasar pada tahun 2009 sebesar 17.14 persen dan pada tahun 2013 sebesar 17.27 persen.

Angka partisipasi murni pendidikan dasar tertinggi ketiga adalah pulau Bali dan Nusa Tenggara, kemudian pulau Sulawesi, pulau Kalimantan, serta pulau Maluku dan Papua sebagai pulau dengan angka partisipasi murni pendidikan dasar terendah yaitu sebesar 15,98 persen pada tahun 2009 dan pada tahun 2013 menjadi 16,06 persen.

2. Dana Alokasi Khusus Untuk Pendidikan

Data Dana Alokasi Khusus Pendidikan yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Dana Alokasi Khusus untuk Pendidikan pada tahun 2009 sampai 2013 yang diperoleh dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Tabel IV.3
Dana Alokasi Khusus Pendidikan Berdasarkan Beberapa Provinsi di Indonesia

Provinsi		Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
Tertinggi	Jawa Timur	884,66 M	937,65 M	1,067 T	1,112 T	1,112 T
	Jawa Barat	744,33 M	938,09 M	969,56 M	1,155 T	1,166 T
	Jawa Tengah	690,74 M	917,47 M	1,131 T	1,199 T	1,079 T
Terendah	Kep. Riau	43,32 M	32,64 M	22,09 M	26,34 M	36,04 M
	Riau	97,04 M	49,82 M	59,55 M	93,36 M	115,02 M
	Sulawesi Barat	98,43 M	78,78 M	103,02 M	128,85 M	117,18 M

Sumber: Kementerian Keuangan RI, data diolah

Berdasarkan tabel IV.3 menunjukkan tiga provinsi dengan Dana Alokasi Khusus untuk Pendidikan maksimum. Dana Alokasi Khusus untuk pendidikan maksimum pertama adalah provinsi Jawa Timur mencapai 884,66 M rupiah pada

tahun 2009 dan pada tahun 2013 Dana Alokasi Khusus untuk Pendidikan pada provinsi ini mencapai 1,112 triliun rupiah.

Provinsi dengan Dana Alokasi Khusus untuk Pendidikan maksimum kedua adalah pada provinsi Jawa Barat. Dana Alokasi Khusus untuk pendidikan pada tahun 2009 adalah 744,33 milyar rupiah. Sampai dengan tahun 2013 Dana Alokasi Khusus untuk pendidikan pada provinsi ini adalah mencapai 1,166 triliun rupiah.

Provinsi ketiga dengan Dana Alokasi Khusus untuk pendidikan maksimum adalah provinsi Jawa Tengah. Dana Alokasi Khusus untuk pendidikan provinsi ini tahun 2009 mencapai 690,74 milyar rupiah dan meningkat pada tahun 2013 Dana Alokasi Khusus untuk pendidikan pada provinsi ini mencapai 1,079 triliun rupiah.

Tiga provinsi dengan Dana Alokasi Khusus untuk pendidikan minimum di Indonesia terdapat pada provinsi Kepulauan Riau. Dana Alokasi Khusus untuk pendidikan pada provinsi Kepulauan Riau mencapai 43,32 milyar rupiah pada tahun 2009 dan berfluktuasi hingga pada tahun 2013 Dana Alokasi Khusus untuk pendidikan pada provinsi ini mencapai 36,04 milyar rupiah. Provinsi dengan Dana Alokasi Khusus untuk pendidikan minimum kedua adalah pada provinsi Riau. Dana Alokasi Khusus untuk pendidikan pada tahun 2009 adalah 97,04 milyar rupiah. Sampai dengan tahun 2013 Dana Alokasi Khusus untuk pendidikan pada provinsi ini mencapai 115,02 milyar rupiah. Provinsi ketiga dengan Dana Alokasi Khusus pendidikan minimum adalah provinsi Sulawesi Barat mencapai 98,43 milyar rupiah pada tahun 2009 dan pada tahun 2013 Dana Alokasi Khusus untuk pendidikan pada provinsi ini mencapai 117,18 milyar rupiah.

Tabel IV. 4
Dana Alokasi Khusus Pendidikan Dasar Berdasarkan Wilayah/Pulau
di Indonesia

Wilayah/pulau	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
Sumatera	2,302 T	2,212 T	2,046 T	2,395 T	2,962 T
	(25,62%)	(24,11%)	(20,69%)	(22,32%)	(26,13%)
Jawa	2,954 T	3,558 T	4,025 T	4,494 T	4,694 T
	(32,87%)	(38,78%)	(40,69%)	(41,63%)	(40,29%)
Bali dan Nusa Tenggara	752,53 M	701,92 M	742,28 M	780,11 M	707,07 M
	(8,37%)	(7,65%)	(7,5%)	(7,27%)	(6,24%)
Kalimantan	838,79 M	681,57 M	643,75 M	683,51 M	711,75 M
	(9,33%)	(7,43%)	(6,51%)	(6,37%)	(6,28%)
Sulawesi	1,422 T	1,273 T	1,278 T	1,306 T	1,263 T
	(15,82%)	(13,86%)	(12,91%)	(12,17%)	(11,14%)
Maluku dan Papua	718,64 M	748,73 M	1,157 T	1,072 T	1,001 T
	(7,99%)	(8,16%)	(11,69%)	(9,99%)	(8,83%)

Sumber: Kementerian Keuangan RI, data diolah

Berdasarkan data pada tabel 4 dapat dilihat bahwa Dana Alokasi Khusus untuk pendidikan maksimum berdasarkan enam wilayah/pulau di Indonesia selama lima tahun terdapat pada pulau Jawa, dengan jumlah mencapai 2,954 triliun rupiah pada tahun 2009 dan meningkat mencapai 4,694 triliun pada tahun 2013. Dana Alokasi Khusus untuk pendidikan maksimum kedua adalah pada pulau Sumatera yaitu sebesar 2,302 triliun rupiah pada tahun 2009 dan meningkat menjadi 2,962 triliun rupiah pada tahun 2013. Dana Alokasi Khusus untuk Pendidikan maksimum ketiga adalah pulau Sulawesi, kemudian pulau Kalimantan, Bali dan Nusa Tenggara dan terakhir Maluku dan Papua, sebagai pulau dengan Dana Alokasi Khusus untuk pendidikan terendah yaitu sebesar 718,64 milyar rupiah pada tahun 2009. Dana Alokasi Khusus untuk pendidikan

pada pulau ini meningkat sampai pada tahun 2013 menjadi sebesar 1,001 triliun rupiah pada tahun 2013.

3. Dana Dekonsentrasi Untuk Pendidikan

Data Dana Dekonsentrasi untuk Pendidikan yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Dana Dekonsentrasi untuk Pendidikan pada 33 provinsi di Indonesia tahun 2009 sampai 2013 yang diperoleh dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Tabel IV.5
Dana Dekonsentrasi untuk Pendidikan Berdasarkan Beberapa Provinsi di Indonesia

Provinsi		Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
Tertinggi	DKI Jakarta	1,287 T	937,75 M	91,25 M	345,66 M	710,25 M
	Banten	1,275 T	966,85 M	88,24 M	203,61 M	476,99 M
	Jawa Barat	1,264 T	707,38 M	256,05 M	549,85 M	785,42 M
Terendah	Papua Barat	170,99 M	132,72 M	53,30 M	61,49 M	92,03 M
	Kep. Riau	184,93 M	178,13 M	48,41 M	58,85 M	109,56 M
	Kep. Bangka Belitung	186,91 M	160,82 M	45,07 M	50,25 M	99,67 M

Sumber: Kementerian Keuangan RI, data diolah

Data pada tabel IV.5 menunjukkan tiga provinsi dengan Dana Dekonsentrasi untuk pendidikan maksimum. Selama kurun waktu lima tahun, ketiga provinsi tersebut tampak berfluktuasi setiap tahunnya mengalami penurunan pada tahun 2010 dan 2011 kemudian meningkat di tahun 2012 dan tahun 2013.

Urutan maksimum pertama Dana untuk Dekonsentrasi pendidikan adalah provinsi DKI Jakarta tahun 2009 adalah sebesar 1,287 triliyun rupiah. Pada tahun

2013 Dana Dekonsentrasi untuk pendidikan pada provinsi DKI Jakarta menjadi 710,25 milyar rupiah. Provinsi Banten sebagai provinsi urutan maksimum kedua. Pada tahun 2009 Dana Dekonsentrasi untuk pendidikan di provinsi ini sebesar 1,275 triliun rupiah dan pada tahun 2013 menjadi 476,99 milyar rupiah. Provinsi ketiga dengan Dana Dekonsentrasi untuk pendidikan maksimum adalah Jawa Barat dengan Dana Dekonsentrasi untuk pendidikan pada tahun 2009 sebesar 1,264 triliun rupiah dan pada tahun 2013 menjadi 785,42 milyar rupiah.

Tiga provinsi dengan Dana Dekonsentrasi untuk pendidikan minimum terdapat pada provinsi Papua Barat. Dana Dekonsentrasi untuk pendidikan pada tahun 2009 adalah 170,99 milyar rupiah. Sampai dengan tahun 2013 Dana Dekonsentrasi untuk pendidikan pada provinsi ini menjadi 92,03 milyar rupiah. Provinsi dengan Dana Dekonsentrasi untuk pendidikan minimum kedua adalah provinsi Kep. Riau. Dana Dekonsentrasi untuk pendidikan pada provinsi Kep.Riau mencapai 184,93 milyar rupiah pada tahun 2009 dan pada tahun 2013 Dana Dekonsentrasi untuk pendidikan pada provinsi ini mencapai 109,56 milyar rupiah. Kep. Bangka Belitung menjadi provinsi ketiga dengan Dana Dekonsentrasi untuk pendidikan minimum pada tahun 2009 mencapai 186,91 milyar rupiah dan pada tahun 2013 Dana Dekonsentrasi untuk pendidikan provinsi ini mencapai 99,67 milyar rupiah.

Tabel IV.6
Dana Dekonsentrasi untuk Pendidikan Berdasarkan Wilayah/Pulau di Indonesia

Wilayah/pulau	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
Sumatera	6,550 T	5,326 T	1,491 T	1,918 T	2,989 T
	(30,32%)	(33,17%)	(34,12%)	(33,07%)	(27,79%)
Jawa	6,825 T	4,721 T	1,110 T	1,942 T	3,473 T
	(31,59%)	(29,4%)	(25,42%)	(33,48%)	(32,28%)
Bali dan Nusa Tenggara	2,142 T	1,573 T	318,49 M	456,32 M	1,031 M
	(9,91%)	(9,79%)	(7,29%)	(7,87%)	(9,58%)
Kalimantan	2,068 T	1,378 T	652,59 M	441,25 M	1,078 T
	(13,2%)	(13,26%)	(11,66%)	(11,86%)	(14,44%)
Sulawesi	2,853 T	2,129 T	509,47 M	688,24 M	1,553 T
	(13,2%)	(13,26%)	(11,66%)	(11,86%)	(14,44%)
Maluku dan Papua	1,169 T	932,25 M	287,58 M	354,53 M	635,65 M
	(5,41%)	(5,8%)	(6,58)	(6,11%)	(5,91%)

Sumber: Kementerian Keuangan RI, data diolah

Berdasarkan data pada tabel IV.6 dapat dilihat bahwa Dana Dekonsentrasi untuk pendidikan terbesar berdasarkan enam wilayah/pulau di Indonesia selama lima tahun terdapat pada pulau Jawa, dengan jumlah mencapai 6,825 triliun rupiah pada tahun 2009 dan pada tahun 2013 sehingga menjadi 3,473 triliun rupiah.

Urutan kedua Dana Dekonsentrasi untuk pendidikan terbesar adalah pada pulau Sumatera yaitu sebesar 6,550 triliun rupiah pada tahun 2009. Pada tahun 2013 Dana Dekonsentrasi untuk pendidikan pada pulau ini menjadi 2,989 triliun rupiah.

Dana Dekonsentrasi untuk pendidikan terbesar ketiga adalah pulau Sulawesi, kemudian pulau Bali dan Nusa Tenggara, pulau Kalimantan serta pulau Maluku dan Papua sebagai pulau dengan Dana Dekonsentrasi untuk pendidikan terendah

yaitu sebesar 1,169 triliun rupiah pada tahun 2009 dan menjadi 635,65 triliun rupiah pada tahun 2013.

4. Pendapatan Perkapita

Data pendapatan perkapita yang digunakan dalam penelitian ini adalah data PDRB Tanpa Migas per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2000 pada 33 provinsi di Indonesia tahun 2009-2013 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik.

Tabel IV.7
Pendapatan Perkapita Berdasarkan Beberapa Provinsi di Indonesia (dalam ribu rupiah)

Provinsi		Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
Tertinggi	DKI Jakarta	18951.56	20939.4	23195.9	25510	27774.7
	Kalimantan Timur	17404.87	18747	20447.8	22147.6	22698.2
	Kep. Riau	12672.19	13245.2	14057.6	14909.7	15665.1
Terendah	Nusa Tenggara Timur	2582.9	2666.02	2767.46	2867.82	2976.62
	Gorontalo	2649.4	2792.35	2956.5	3132.33	3321.11
	Maluku	2651.26	2748.39	2861.72	3029.7	3128.99

Sumber: Biro Pusat Statistik, data diolah

Data pada tabel 7 menunjukkan tiga provinsi dengan pendapatan perkapita maksimum. Selama kurun waktu lima tahun, ketiga provinsi tersebut tampak selalu mengalami peningkatan pendapatan perkapita setiap tahunnya. Urutan maksimum pertama Pendapatan perkapita adalah provinsi DKI Jakarta tahun 2009 sebesar 18951.56 ribu rupiah. Pada tahun 2013 pendapatan perkapita pada provinsi DKI Jakarta mengalami peningkatan menjadi 27774.7 ribu rupiah.

Kalimantan Timur sebagai provinsi dengan pendapatan perkapita maksimum kedua, pada tahun 2009 pendapatan perkapita pada provinsi ini adalah sebanyak 17404.87 ribu rupiah dan meningkat pada tahun 2013 menjadi 22698.2 ribu rupiah. Provinsi ketiga dengan pendapatan perkapita maksimum adalah provinsi Kep. Riau. Pada tahun 2009 pendapatan perkapita di provinsi ini adalah sebesar 12672.19 ribu rupiah dan mengalami peningkatan pada tahun 2013 sehingga pendapatan perkapita pada provinsi ini menjadi 15665.1 ribu rupiah.

Tiga provinsi dengan pendapatan perkapita minimum terdapat pada provinsi Nusa Tenggara Timur mencapai 2582.9 ribu rupiah pada tahun 2009 dan meningkat pada tahun 2013 pendapatan perkapita provinsi ini mencapai 2976.62 ribu rupiah. Provinsi dengan pendapatan perkapita minimum kedua adalah pada provinsi Gorontalo. Pendapatan perkapita pada tahun 2009 adalah 2649.4 ribu rupiah. Sampai dengan tahun 2013 pendapatan perkapita pada provinsi ini mengalami peningkatan menjadi 3321.11 ribu rupiah. Provinsi ketiga dengan pendapatan perkapita minimum adalah provinsi Maluku. Pendapatan perkapita pada provinsi Maluku mencapai 2651.26 ribu rupiah pada tahun 2012 dan mengalami peningkatan pada tahun 2013 pendapatan perkapita pada provinsi ini mencapai 3128.99 ribu rupiah.

Tabel IV.8
Pendapatan Perkapita Berdasarkan Wilayah/Pulau di Indonesia (dalam ribu rupiah)

Wilayah/Pulau	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
Sumatera	72801.46	75743.42	79572.4	83655	87428.9
	(31,31%)	(31,06%)	(30,94%)	(30,79%)	(30,58%)
Jawa	53442.06	57036.02	61093.9	65328.4	69475.3
	(22,99%)	(23,39%)	(23,75%)	(24,04%)	(24,30%)
Bali dan Nusa Tenggara	13933.06	14502.44	14802.6	15211.5	15886.9
	(5,99%)	(5,95%)	(5,76%)	(5,60%)	(5,56%)
Kalimantan	40062.51	42382.37	45075.6	47768.5	49397.4
	(17,23%)	(17,38%)	(17,53%)	(17,58%)	(17,28%)
Sulawesi	30947.89	33003.12	35208.8	37708.9	40069.2
	(13,31%)	(13,53%)	(13,69%)	(13,88%)	(14,02%)
Maluku dan Papua	21309.33	21222.23	21443.5	22604.7	23633
	(9,17%)	(8,70%)	(8,34%)	(8,12%)	(8,27%)

Sumber: Biro Pusat Statistik, data diolah

Berdasarkan data pada tabel IV.8 dapat dilihat bahwa Pendapatan Perkapita terbesar berdasarkan enam wilayah/pulau di Indonesia selama lima tahun terdapat pada pulau Sumatera, dengan jumlah mencapai 72801.46 ribu rupiah pada tahun 2009 dan pada tahun 2013 mencapai 87428.9 ribu rupiah.

Urutan kedua Pendapatan Perkapita terbesar adalah pada pulau Jawa yaitu sebesar 53442.06 ribu rupiah pada tahun 2009. Pada tahun 2013 Pendapatan Perkapita pada pulau ini 69475.3 ribu rupiah. Pendapatan Perkapita terbesar ketiga adalah pulau Kalimantan, kemudian pulau Sulawesi, pulau Maluku dan Papua serta pulau Bali dan Nusa Tenggara sebagai pulau dengan Pendapatan Perkapita terendah yaitu sebesar 13933.06 rupiah pada tahun 2009 dan menjadi 15886.9 rupiah pada tahun 2013.

B. Pengujian Hipotesis

Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel dan diolah menggunakan program EViews 7.0. Kelebihan dari program ini adalah kemampuannya dalam mengolah data panel menjadi lebih mudah karena dapat diperlakukan sebagai data *cross section*, *time series*, maupun sebagai data panel. Hasil pengolahan data tersebut adalah sebagai berikut:

1. Estimasi Model

Penelitian ini menggunakan analisis data panel yang merupakan gabungan data *cross section* dan data *time series*. Dalam penelitian ini, analisis regresi yang dilakukan adalah pengaruh Dana Alokasi Khusus untuk Pendidikan, Dana Dekonsentrasi untuk Pendidikan dan Pendapatan Perkapita terhadap Angka Partisipasi Murni Pendidikan Dasar di Indonesia. Model regresi data panel dapat dilakukan dengan tiga model estimasi, yaitu *common effect*, *fixed effect*, dan *random effect*.

2. Uji Metode Estimasi Data Panel

a. Chow Test

Chow Test (uji Chow) merupakan uji tahapan awal untuk mendapatkan model regresi terbaik antara model *common effect* dan model *fixed effect*. Penarikan kesimpulan dari hasil uji Chow ini dapat dilihat dari nilai probabilitas (*p-value*) yang dibandingkan dengan alpha.

Tabel IV.9
Pengujian Signifikansi *Common Effect* dan *Fixed Effect* Angka Partisipasi Murni Pendidikan Dasar

Redundant Fixed Effects Tests			
Pool: Untitled			
Test cross-section fixed effects			
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	29.946848	(32,129)	0.0000
Cross-section Chi-square	351.720540	32	0.0000

Sumber: Data olahan Eviews 7.0

Berdasarkan hasil pengujian dengan EViews 7.0 pada Angka Partisipasi Murni pendidikan dasar diperoleh *p-value Cross-section F* sebesar 0,0000 dan α sebesar 0,05. Dengan demikian *p-value Cross-section F* ($0,0000 < \alpha$ ($0,05$)). Sehingga H_0 ditolak, maka model *fixed effect* lebih baik daripada model *common effect* pada Angka Partisipasi Murni pendidikan dasar.

b. Hausman Test

Hausman test (uji Hausman) merupakan pengujian statistik untuk memilih model terbaik antara *fixed effect* dan *random effect*. Pada uji Hausman ini menggunakan alpha sebesar 5% ($0,05$) dengan ketentuan menerima H_0 jika nilai *p-value* $>$ alpha.

Tabel IV.10
Pengujian Signifikansi *Fixed Effect* dan *Random Effect* Angka
Partisipasi Murni Pendidikan Dasar

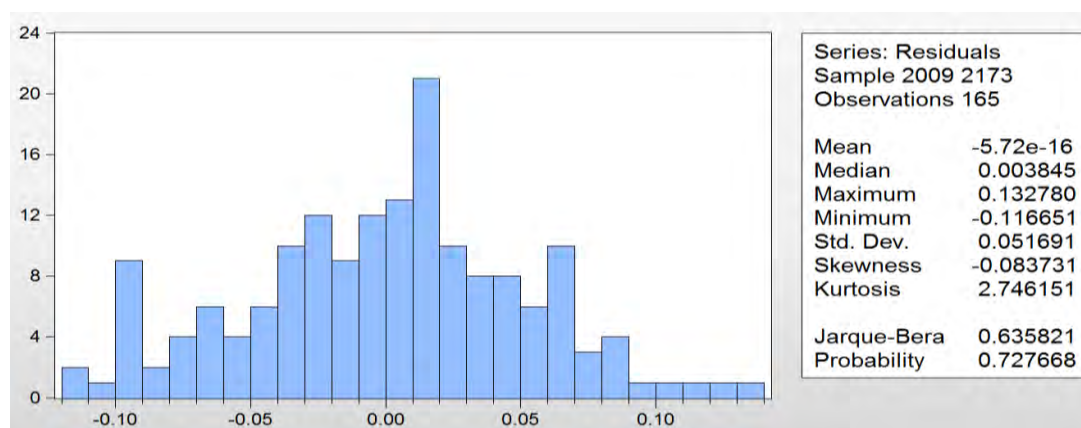
Correlated Random Effects - Hausman Test			
Pool: Untitled			
Test cross-section random effects			
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	18.632093	3	0.0003

Sumber: Data Olan Eviews 7.0

Berdasarkan hasil pengujian dengan EViews 7.0 pada Angka Partisipasi Murni pendidikan dasar diperoleh nilai *p-value* *cross-section random* pada uji sebesar 0,0003 dan α sebesar 0,05. Dengan demikian *p-value* *cross-section random* (0,0003) $< \alpha$ (0,05). Sehingga H_0 ditolak, maka model *fixed effect* lebih baik daripada model *random effect* pada Angka Partisipasi Murni pendidikan dasar.

3. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas



Sumber: Data Olan Eviews 7.0

Gambar IV.2
Uji Normalitas

Hasil *output Eviews.7.0* menunjukkan *p-value* Jarque-Bera adalah $0.727668 > 0,05$. Dengan demikian, H_0 diterima yang artinya data berdistribusi normal. Selain menggunakan uji normalitas, untuk melihat apakah data yang digunakan seluruhnya berdistribusi normal dengan menggunakan statistik deskriptif.

Tabel IV.11
Statistik Deskriptif

	LN_APMPD	LN_DAK	LN_DEKON	LN_Y_PERKAPITA
Mean	4.428896	26.09584	26.23893	8.843255
Median	4.435601	26.06889	26.26864	8.892165
Maximum	4.572755	27.81310	27.88302	10.23188
Minimum	4.302134	23.81853	24.53129	7.856668
Std. Dev.	0.057066	0.837857	0.872432	0.485913
Skewness	-0.011380	0.013381	0.006792	0.166115
Kurtosis	2.729966	2.833314	1.946126	3.568171
Jarque-Bera	0.504877	0.195941	7.636997	2.978217
Probability	0.776904	0.906676	0.021961	0.225574
Sum	730.7678	4305.814	4329.423	1459.137
Sum Sq. Dev.	0.534074	115.1288	124.8265	38.72230
Observations	165	165	165	165

Sumber: Data Olahan Eviews 7.0

Dilihat dari Jarque-Bera masing-masing variabel semuanya lebih kecil dari tabel *Chi-Square*, yaitu 7.81473 untuk prob. 0,05 dan derajat kebebasan 3. Artinya, seluruh variabel yang digunakan berdistribusi normal.

b. Uji Heterokedastisitas

Pengujian struktur heteroskedastisitas dilakukan setelah model *fixed effect* memenangkan hasil estimasi model terbaik. Hal tersebut bertujuan untuk menghindari hasil estimasi model *fixed effect* yang bias apabila berstruktur heteroskedastik.

Tabel IV.12
Uji Heterokedastisitas

Heteroskedasticity Test: White			
F-statistic	1.147789	Prob. F(3,161)	0.3316
Obs*R-squared	3.455022	Prob. Chi-Square(3)	0.3266
Scaled explained SS	2.872014	Prob. Chi-Square(3)	0.4118

Sumber: Data Olahan Eviews 7.0

Berdasarkan hasil uji *White* yang dilakukan pada model ini menunjukkan *p-value Prob. Chi-Square* pada *Obs*R-Squared* adalah sebesar 0.3266 yang lebih besar dari alpha sebesar 0,05. Maka H_0 diterima, artinya tidak terdapat heteroskedastisitas. Dengan demikian residual pada model tersebut dapat dikatakan memenuhi asumsi homoskedastisitas.

4. Uji Hipotesis

a. Uji t

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen dengan membandingkan antara probabilitas dengan tingkat signifikansi sebesar 5%. Kriteria untuk uji t (parsial) ini adalah apabila probabilitasnya (signifikansi) $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan sebaliknya apabila probabilitas (signifikansi) $\geq 0,05$ maka H_0 diterima yang artinya variabel bebas tidak memiliki pengaruh secara parsial terhadap variabel terikat. Dapat pula dilihat dari t hitung $>$ t tabel, dengan $\alpha=5\%$ dan derajat kebebasan (df) = $n-k-1$ atau $165-3-1=161$ sehingga diperoleh t tabel sebesar 1,65437.

Tabel IV.13
Uji t Angka Partisipasi Murni Pendidikan Dasar

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2.204389	0.276497	7.972564	0.0000
LN_DAK?	0.036709	0.006741	5.445844	0.0000
LN_DEKON?	0.005225	0.002612	2.000677	0.0475
LN_Y_PERKAPITA?	0.127719	0.024234	5.270153	0.0000

Sumber: Data Olahan Eviews 7.0

Hasil olahan data di atas dapat dijelaskan menurut masing-masing variabel bebas seperti di bawah ini:

1. Pengaruh Dana Alokasi Khusus untuk Pendidikan terhadap Angka Partisipasi Murni Pendidikan Dasar

Berdasarkan tabel IV.12 untuk variabel Dana Alokasi Khusus Pendidikan diperoleh t_{hitung} sebesar 5.445844 sedangkan t_{tabel} pada tabel distribusi t dengan alpha 5 % dan derajat kebebasan (df) = n-k-1 atau 165-3-1 = 161 hasilnya diperoleh t_{tabel} sebesar 1,65437. Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai $|t_{hitung}|$ (5.445844) > t_{tabel} (1,65437). Sehingga H_0 ditolak, maka koefisien regresi dikatakan signifikan. Selain itu, penarikan kesimpulan juga dapat dilihat dari *p-value* sebesar 0.0000 dan α sebesar 0,05. Dengan demikian *p-value* (0.0000) < α (0,05). Sehingga dapat disimpulkan pada tingkat kepercayaan 95% bahwa Dana Alokasi Khusus Pendidikan pengaruh positif signifikan terhadap Angka Partisipasi Murni Pendidikan Dasar.

2. Pengaruh Dana Dekonsentrasi untuk Pendidikan terhadap Angka Partisipasi Murni Pendidikan Dasar.

Berdasarkan tabel IV.12 untuk variabel Dana Dekonsentrasi untuk Pendidikan diperoleh t_{hitung} sebesar 2.000677 sedangkan t_{tabel} pada tabel distribusi t dengan alpha 5 % dan derajat kebebasan (df) = n-k-1 atau 165-3-1 = 161 hasilnya diperoleh t_{tabel} sebesar 1,65437. Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai $|t_{hitung}|$ (2.000677) > t_{tabel} (1,65437). Sehingga H_0 ditolak, maka koefisien regresi dikatakan signifikan. Selain itu, penarikan kesimpulan juga dapat dilihat dari *p-value* sebesar 0.0475 dan α sebesar 0,05. Dengan demikian *p-value* (0.0475) < α (0,05). Sehingga dapat disimpulkan pada tingkat kepercayaan 95% bahwa Dana Dekonsentrasi Pendidikan pengaruh positif signifikan terhadap Angka Partisipasi Murni Pendidikan Dasar.

3. Pengaruh Pendapatan Perkapita terhadap Angka Partisipasi Murni Pendidikan Dasar

Berdasarkan tabel IV.12 untuk variabel Pendapatan Perkapita diperoleh t_{hitung} sebesar 5.270153 sedangkan t_{tabel} pada tabel distribusi t dengan alpha 5 % dan derajat kebebasan (df) = n-k-1 atau 165-3-1 = 161 hasilnya diperoleh t_{tabel} sebesar 1,65437. Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai $|t_{hitung}|$ (5.270153) > t_{tabel} (1,65437). Sehingga H_0 ditolak, maka koefisien regresi dikatakan signifikan. Selain itu, penarikan kesimpulan juga dapat dilihat dari *p-value* sebesar 0,0000 dan α sebesar 0,05. Dengan demikian *p-value* (0,0000) < α (0,05). Sehingga dapat disimpulkan pada tingkat kepercayaan 95% bahwa

Pendapatan Perkapita pengaruh positif signifikan terhadap Angka Partisipasi Murni Pendidikan Dasar.

b. Uji F

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen dengan menggunakan tingkat signifikansi 5%.

Kriteria untuk uji F ini adalah apabila probabilitas (signifikansi) $\leq 0,05$ maka H_0 ditolak yang artinya terdapat pengaruh secara simultan antara variabel bebas dengan variabel terikat dan sebaliknya apabila probabilitas (signifikansi) $> 0,05$ maka H_0 diterima, artinya bahwa tidak terdapat pengaruh secara simultan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Serta dengan melihat $F_{hitung} > F_{tabel}$ yakni df_1 (jumlah variabel-1) dan df_2 ($n-k-1$) dimana n ialah jumlah observasi dan k adalah jumlah variabel independen sehingga didapat F_{tabel} sebesar 2.66.

Tabel IV. 14
Uji F Angka Partisipasi Murni Pendidikan Dasar

R-squared	0.902656	Mean dependent var	4.428896
Adjusted R-squared	0.876245	S.D. dependent var	0.057066
S.E. of regression	0.020075	Akaike info criterion	-4.788430
Sum squared resid	0.051989	Schwarz criterion	-4.110769
Log likelihood	431.0455	Hannan-Quinn criter.	-4.513344
F-statistic	34.17708	Durbin-Watson stat	1.637270
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Data Olahan Eviews 7.0

Berdasarkan tabel IV.13 diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 34.17708 sedangkan nilai F_{tabel} sebesar 2.66. Hasil tersebut menunjukkan bahwa F_{hitung} (34.17708) $>$

F_{tabel} (2.66). Sehingga H_0 ditolak maka seluruh variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen secara simultan. Selain itu, penarikan kesimpulan juga dapat dilihat dari probabilitas (F-statistik) sebesar 0,000000 dimana nilai probabilitas ini berada dibawah nilai signifikansi sebesar 5% ($0,000000 < 0,05$). Dapat disimpulkan bahwa hasil uji F (simultan) menolak H_0 , artinya bahwa variabel Dana Alokasi Khusus untuk pendidikan, Dana Dekonsentrasi untuk pendidikan dan Pendapatan perkapita memiliki pengaruh secara simultan terhadap Angka Partisipasi Murni Pendidikan Dasar pada periode 2009-2013.

c. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur kebaikan atau kesesuaian suatu model persamaan regresi. Namun dalam penelitian ini, untuk melihat koefisien determinasi lebih dilihat dari nilai *Adjusted R²* karena lebih relevan dibanding R^2 ketika nilai variabel naik maka nilai *Adjusted R²* bisa naik maupun turun.

Tabel IV.15
Uji R^2 Angka Partisipasi Murni Pendidikan Dasar

R-squared	0.902656	Mean dependent var	4.428896
Adjusted R-squared	0.876245	S.D. dependent var	0.057066

Sumber: Data Olahan Eviews 7.0

Dari tabel di atas diperoleh koefisien determinasi atau *Adjusted R² Square* adalah 0.876245 maka dapat dinyatakan bahwa seluruh variabel independen mampu menjelaskan keragaman nilai pada variabel Angka Partisipasi Murni untuk pendidikan dasar sebesar 87,62% sedangkan sisanya 12,38% dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang berada di luar model penelitian.

C. Pembahasan

Berdasarkan tahapan dan perhitungan yang telah dilakukan pada periode waktu tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 terhadap 33 Provinsi di Indonesia. Dimana bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh antara Dana Alokasi Khusus untuk pendidikan, Dana dekonsentrasi untuk pendidikan dan pendapatan perkapita terhadap Angka Partisipasi Murni pendidikan dasar, penelitian dalam hal ini menggunakan model-model estimasi, dimana berdasarkan hasil penelitian model terbaik yang cocok digunakan dalam penelitian ini adalah model *Fixed Effects*. Penelitian ini mempunyai persamaan regresi data panel sebagai berikut:

$$\text{LnAMPMPD} = 2.204389 + 0.036709\text{LnDAK}_{it} + 0.005225\text{LnDEKON}_{it} + 0.127719\text{LnY_PERKAPITA}_{it} + e$$

Hasil persamaan regresi di atas memiliki nilai konstanta sebesar 2.204389, artinya bahwa ketika Dana Alokasi Khusus untuk pendidikan, Dana Dekonsentrasi untuk pendidikan dan Pendapatan perkapita adalah konstan, maka Angka Partisipasi Murni pendidikan dasar di Indonesia adalah sebesar 2.204389 persen. Dalam pengujian persamaan regresi (lampiran 7) dapat diketahui daerah yang koefisien negatif dan positif. Daerah yang berkoefisien positif terdiri dari Provinsi Nanggoroe Aceh Darrusalam, Sumatera Barat, Riau, Kep. Riau, Jambi, Kep. Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Jawa Tengah, DIY, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara. Sedangkan

daerah yang berkoeffisien negatif adalah Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Papua, Papua Barat.

Hasil estimasi model terbaik menunjukkan Dana Alokasi Khusus pendidikan memiliki pengaruh positif dan signifikan yang ditunjukkan oleh nilai t_{hitung} (5.445844) yang lebih besar dari nilai t_{tabel} (1,65437) pada pendidikan dasar. Hal ini dapat diartikan jika Dana Alokasi Khusus pendidikan naik, maka angka partisipasi murni pun akan naik, begitu juga sebaliknya. Hasil tersebut juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Maghfirroh Yenny (2008) yang dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa Dana Alokasi Khusus Pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap angka partisipasi murni.

Hasil estimasi model terbaik juga menunjukkan dana dekonsentrasi untuk pendidikan memiliki pengaruh positif dan signifikan yang ditunjukkan oleh nilai t_{hitung} (2.000677) yang lebih besar dari nilai t_{tabel} (1,65437) pada pendidikan dasar. Hasil tersebut juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Maghfirroh Yenny (2008) yang dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa Dana Dekonsentrasi untuk pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap angka partisipasi murni. Sejalan juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Azwan, *et al* (2014) bahwa Dana Dekonsentrasi pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap angka partisipasi murni.

Hasil estimasi model terbaik juga menunjukkan pendapatan perkapita

memiliki pengaruh positif dan signifikan yang ditunjukkan oleh nilai t_{hitung} (5.270153) yang lebih besar dari nilai t_{tabel} (1,65437) pada pendidikan dasar. Hasil tersebut juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Mahocca Swangga Purusa, *et al* (2013) yang dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa Pendapatan Perkapita/ PDRB Perkapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap angka partisipasi murni. Artinya peningkatan pada PDRB perkapita akan memacu peningkatan angka partisipasi murni.

Variabel Dana Alokasi Khusus pendidikan memiliki pengaruh positif terhadap angka partisipasi murni pendidikan dasar dengan koefisien sebesar 0.036709. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa ketika Dana Alokasi Khusus pendidikan naik 1% dengan asumsi *ceteris paribus*, maka angka partisipasi murni pendidikan dasar mengalami kenaikan sebesar 0.036709 persen. Berarti hasil estimasi ini sesuai dengan hipotesis awal yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus pendidikan memiliki pengaruh positif terhadap angka partisipasi murni pada pendidikan dasar di Indonesia.

Variabel Dana Dekonsentrasi untuk pendidikan memiliki pengaruh positif terhadap angka partisipasi murni pendidikan dasar dengan koefisien sebesar 0.005225. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa ketika Dana Dekonsentrasi pendidikan naik 1% dengan asumsi *ceteris paribus*, maka angka partisipasi murni pendidikan dasar mengalami kenaikan sebesar 0.005225 persen. Berarti hasil estimasi ini sesuai dengan hipotesis awal yang menyatakan bahwa Dana Dekonsentrasi pendidikan memiliki pengaruh positif terhadap angka partisipasi murni pada pendidikan dasar di Indonesia.

Variabel Pendapatan Perkapita memiliki pengaruh positif terhadap angka partisipasi murni pendidikan dasar dengan koefisien sebesar 0.127719. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa ketika Pendapatan perkapita naik 1% dengan asumsi *ceteris paribus*, maka angka partisipasi murni pendidikan dasar mengalami kenaikan sebesar 0.127719 persen. Berarti hasil estimasi ini sesuai dengan hipotesis awal yang menyatakan bahwa pendapatan memiliki pengaruh positif terhadap angka partisipasi murni pada pendidikan dasar di Indonesia.

Pengujian simultan melalui parameter F_{hitung} dibandingkan dengan F_{tabel} diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 34.17708 dan F_{tabel} sebesar 2,66. Karena F_{hitung} (34.17708) $> F_{tabel}$ (2,66) dengan tingkat kepercayaan 95%, maka Dana Alokasi Khusus untuk pendidikan, Dana Dekonsentrasi untuk pendidikan dan pendapatan perkapita secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap angka partisipasi murni pada pendidikan dasar di Indonesia.

Hasil pengujian koefisien determinasi (*Adjusted R²*) pada angka partisipasi murni pendidikan dasar menunjukkan nilai 0.876245. Dapat dikatakan bahwa 87,62% angka partisipasi murni pada pendidikan dasar di Indonesia dapat dijelaskan oleh ketiga variabel independen, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

Hal ini didukung oleh penelitian Maghfiroh Yenny yang mengatakan bahwa DAK untuk pendidikan, Dana Dekonsentrasi untuk dan Pendapatan perkapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap Angka Partisipasi Murni pendidikan dasar.

D. Keterbatasan Penelitian

Meskipun penelitian ini telah berhasil menguji hipotesis yang diajukan, namun disadari bahwa penelitian ini tidak sepenuhnya sampai pada tingkat kebenaran mutlak, sehingga tidak menutup kemungkinan dilakukannya penelitian lanjutan. Hal tersebut disebabkan masih banyak terdapat keterbatasan dalam penelitian, diantaranya adalah:

1. Penelitian hanya meneliti variabel Dana Alokasi Khusus untuk pendidikan, Dana Dekonsentrasi untuk pendidikan dan Pendapatan Perkapita, namun sesungguhnya ada faktor lain yang mempengaruhi Pembangunan Pendidikan.
2. Penelitian hanya menggunakan Angka Partisipasi Murni Pendidikan Dasar untuk mengukur Pembangunan Pendidikan di Indonesia.
3. Dari segi waktu penelitian yang digunakan kurang lama. Sebaiknya waktu penelitian yang dipakai lebih lama agar dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan menarik sehingga hasil penelitian benar-benar jelas dapat dijadikan sebagai rujukan/gambaran dalam pengambilan keputusan untuk pihak-pihak terkait.

BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh dana alokasi khusus pendidikan, dana dekonsentrasi dan pendapatan perkapita terhadap pembangunan pendidikan di Indonesia, maka peneliti mengambil beberapa kesimpulan, yaitu :

1. Variabel dana alokasi khusus untuk pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel pembangunan pendidikan angka partisipasi murni pendidikan dasar di Indonesia pada tahun 2009 sampai dengan 2013.
2. Variabel dana dekonsentrasi untuk pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel pembangunan pendidikan angka partisipasi murni pendidikan dasar di Indonesia pada tahun 2009 sampai dengan 2013.
3. Variabel pendapatan perkapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel pembangunan pendidikan angka partisipasi murni pendidikan dasar di Indonesia pada tahun 2009 sampai dengan 2013.
4. Variabel dana alokasi khusus pendidikan, dana dekonsentrasi pendidikan dan pendapatan perkapita bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap pembangunan pendidikan angka partisipasi murni pendidikan dasar. Variabel dana alokasi khusus, dana dekonsentrasi dan pendapatan

perkapita mampu menjelaskan keragaman nilai pada variabel pembangunan pendidikan angka partisipasi murni pendidikan dasar 87,62%, sedangkan sisanya sebesar 12,38% dijelaskan oleh variabel-variabel lain diluar variaabel yang digunakan dalam penelitian.

B. Implikasi

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, bahwa terdapat pengaruh antara Dana Alokasi Khusus untuk pendidikan, Dana Dekonsentrasi untuk pendidikan dan Pendapatan Perkapita berpengaruh terhadap Pembangunan Pendidikan di Indonesia tahun 2009-2013. Hal tersebut membuktikan bahwa Dana Alokasi Khusus untuk pendidikan, Dana Dekonsentrasi untuk pendidikan dan pendapatan perkapita merupakan beberapa faktor penentu Pembangunan Pendidikan. Implikasi dari penelitian ini adalah:

1. Upaya peningkatan pembangunan pendidikan melalui transfer Dana Alokasi Khusus untuk pendidikan yang disalurkan dari Kas Pusat ke Kas Daerah yang tercatat di dalam APBD harus mampu mendukung dan mendorong pemerataan pelayanan pendidikan khususnya pendidikan dasar yang menjadi hak setiap warganegara.
2. Upaya peningkatan pembangunan pendidikan melalui transfer Dana Dekonsentrasi untuk pendidikan yang digunakan untuk pendanaan kegiatan yang bersifat non-fisik.

3. Upaya peningkatan pembangunan pendidikan melalui meningkatkan Pendapatan masyarakat melalui pengentasan kemiskinan dan peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat.

C. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan implikasi yang dikemukakan diatas, maka peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Dana Alokasi Khusus untuk pendidikan dan Dana dekonsentrasi untuk berdasarkan hasil penelitian berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembangunan pendidikan yang diproksi dengan angka partisipasi murni pendidikan dasar, dengan hasil tersebut diharapkan pemerintah untuk menganggarkan atau memperhitungkan dana tersebut dapat lebih memperhatikan pembangunan baik untuk daerah-daerah baru hasil pemekaran maupun pemerataan akses pendidikan untuk wilayah Jawa maupun luar Jawa sehingga pemerataan pelayanan dapat berjalan lebih baik lagi.
2. Diharapkan pemerintah untuk bisa lebih meningkatkan pengawasan alokasi pengeluaran pendidikan baik Dana Alokasi Khusus untuk pendidikan maupun Dana Dekonsentrasi untuk pendidikan agar dana pendidikan yang disalurkan tepat sasaran. Dan sebaiknya pemerintah pusat melakukan stimulasi anggaran khusus untuk pelayanan pendidikan yang dapat memperkecil kemungkinan untuk mengalokasikan dana pendidikan tersebut untuk keperluan di luar sektor pendidikan.

3. Diharapkan baik pemerintah maupun swasta untuk bisa meningkatkan pendapatan masyarakat dengan memperluas dan mempermudah kesempatan kerja dan usaha yang langsung menyentuh ke masyarakat.
4. Untuk penelitian selanjutnya bisa turut mempertimbangkan faktor-faktor input dalam pendidikan seperti guru, ruang kelas, fasilitas sekolah dan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Adisasmita Rahardjo, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Anwar, Moch Idochi. 2003. *Administrasi Pendidikan dan Manajemen Biaya Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Bachtiar, Yoyon. 2012. *Kebijakan Pembaruan Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Bappenas. *Evaluasi Pelaksanaan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun*. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2009
- _____. *Pedoman Penyusunan RPJMN 2010-2014*. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
- _____. *Perpres RI, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014*
- Budiman, Arief. 1996. *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*. Jakarta: Gramedia Pustaka
- Buchori, Mochtar. 1994. *Pendidikan dalam Pembangunan*. Yogyakarta: Tiara Wacana
- Bratakusumah, Dedy Supriadi., *et al.* 2003. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka
- Ghozali, Imam. 2007. *Ekonometrika Teori, Konsep dan Aplikasi dengan SPSS 17*. Semarang: Universitas Diponegoro
- Hasbullah. 2009. *Dasar – Dasar Ilmu Kependidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- HAW, Widjaja. 2005. *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Ishaq, Isjoni. 2005. *Wajah Baru Pendidikan Kita*. Riau: Unri Press
- Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Erlangga

- Mardiasmo. 1994. *Akuntansi Biaya Edisi ke-1*. Yogyakarta: ANDI
- _____. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: ANDI
- Mulyasa. 2011. *Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi dan Implementasi*. Bandung: Remaja Rosda Karya
- Moertopo, Ali. 1982. *Strategi Pembangunan Nasional*. Jakarta: CSIS
- Muyono. 2010. *Manajemen Administrasi dan Organisasi Pendidikan*. Yogyakarta: AR Ruzz Media
- _____. 2010. *Konsep Pembiayaan Pendidikan*. Yogyakarta: AR Ruzz Media
- Nachrowi. 2006. *Pendekatan Populer dan Praktis Ekonometrika untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan*. Jakarta: LPFE UI
- _____. 2006. *Analisis Ekonometrika dan Keuangan Menggunakan Ekonometri*. Jakarta: LPFE UI
- Nugroho, Riant. 2013. *Kebijakan Pendidikan yang Unggul*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Priyanto, Duwi. 2009. *SPSS Analisa Korelasi, Regresi dan Multivariate*. Yogyakarta: Gava Media
- Rosidin, Utang. 2010. *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*. Bandung: CV Pustaka Setia
- Sriyana, Jaka. 2014. *Metode Regresi Data Panel*. Yogyakarta: Ekonisia
- Sulaiman, Wahid. 2007. *Analisis Regresi Menggunakan SPSS*. Yogyakarta: ANDI
- Sugiyono. 2004. *Metode Penelitian Bisnis*. Jakarta: Alfabeta
- Supriadi, Dedi. 2010. *Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah*. Bandung: Rosda Karya
- Soedajtmoko. 1994. *Menjelajah Cakrawala: Kumpulan Karya Visioner Soedajtmoko*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- _____. 1996. *Etika Pembebasan: Pilihan Karangan tentang Agama dan Kebudayaan Sejarah dan Ilmu Pengetahuan*. Jakarta: LP3ES
- Triputro, R Widodo. 2005. *Pembaharuan Otonomi Daerah*. STPMD

Uditomo, Purwo. 2013. *Kebijakan dan Praktik Pendidikan Indonesia di Era Transisi Demokrasi*. Jawa Barat: Dompot Dhuafa Makmal Pendidikan

Winarno, Wing Wahyu. 2011. *Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan Eviews Edisi Ke-3*. Yogyakarta: STIM YKPN

Zainuddin. 2008. *Reformasi Pendidikan Kritik Kurikulum dan Manajemen Berbasis Sekolah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

_____. *Nota Keuangan RAPBN 2009*

_____. *Nota Keuangan RAPBN 2011*

JURNAL:

Yenny, Maghfiroh. 2008. *Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Pembangunan Pendidikan di Indonesia*. Jurnal Kebijakan Ekonomi Pascasarjana FE UI.

Hadi, Sasana. *et al.* *Implikasi Desentralisasi Fiskal Terhadap AKABA dan APM SD/MI di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah*. Jurnal ekonomi Diponegoro Vol.2. No. 1. Hal. 1-12. 2013.

Hidayat, M Surya. *et al.* 2014. *Analisa Anggaran Pendidikan Provinsi Jambi*. Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah. Vol.1. No.4. April-Juni 2014.

UNDANG-UNDANG:

Undang-Undang Republik Indonesia No 32 Tahun 2004

Undang-Undang Republik Indonesia No 33 Tahun 2004

SKRIPSI:

Bakti, Galih Pramilo. *Analisis Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Angka Melek Huruf Perempuan dan Angka Partisipasi Sekolah Perempuan di Kabupaten/Kota*. Semarang: Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, 2012

WEB:

<http://www.tempo.co/read/news/2013/11/29/079533298/36-Juta-Warga-Indonesia-Masih-Buta-Aksara>, diakses pada tanggal 25 Maret 2015

http://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_negara_menurut_tingkat_melek_huruf, diakses pada tanggal 25 maret 2015

<http://bps.go.id/Subjek/view/id/28#subjekViewTab1|accordion-daftar-subjek1>, diakses pada tanggal 26 Maret 2015

Lampiran –Lampiran

Lampiran 1 :

Data Mentah Angka Partisipasi Murni Pendidikan Dasar (APMPD), Dana Alokasi Khusus untuk pendidikan (DAK), Dana Dekonsentrasi untuk pendidikan (DEKON) dan Pendapatan Perkapita (Y_PERKAPITA) Tahun 2009-2013

PROVINSI	TAHUN	APMPD (%)	DAK (dalam juta rupiah)	DEKON (dalam juta rupiah)	Y_PERKAPITA (dalam ribu rupiah)
NAD	2009	83.65	209,082	732,120	6402.16
NAD	2010	84.46	249,618	524,903	6427.4
NAD	2011	85.32	250,504	122,891	6652.08
NAD	2012	86.45	254,903	156,616	6912.07
NAD	2013	86.79	300,113	361,399	7137.52
SUMUT	2009	85.47	635,113	987,754	8594.67
SUMUT	2010	85.26	603,993	899,880	9055.34
SUMUT	2011	86.03	650,201	169,312	9515.62
SUMUT	2012	87.92	693,525	886,157	9971.72
SUMUT	2013	88.37	728,991	394,457	10431.66
SUMBAR	2009	88.16	344,443	871,280	7636.47
SUMBAR	2010	89.49	285,163	674,494	7987.56
SUMBAR	2011	90.81	278,848	104,437	8370.65
SUMBAR	2012	92.00	281,479	150,926	8784.84
SUMBAR	2013	91.51	275,017	423,733	9205.66
RIAU	2009	84.99	97,037	782,424	8424.02
RIAU	2010	82.42	49,824	604,464	8725.66
RIAU	2011	83.61	59,545	280,083	9154.37
RIAU	2012	88.19	93,364	128,101	9617.51
RIAU	2013	88.60	115,021	333,010	9945.97
KEPRIAU	2009	89.80	43,318	184,926	22672.19
KEPRIAU	2010	88.12	32,642	178,129	23245.15
KEPRIAU	2011	79.29	22,093	48,406	24057.57
KEPRIAU	2012	81.90	26,335	58,840	24909.74
KEPRIAU	2013	92.36	36,030	109,558	25665.05
JAMBI	2009	84.41	132,155	491,868	4837.1
JAMBI	2010	84.58	228,092	369,482	5045.18
JAMBI	2011	82.96	124,029	73,181	5292.7
JAMBI	2012	83.28	125,804	91,654	5646.58

JAMBI	2013	87.72	569,478	229,748	6021.42
SUMSEL	2009	79.05	272,313	962,077	6395.46
SUMSEL	2010	78.52	240,767	830,094	6725.17
SUMSEL	2011	77.07	212,724	478,724	7157.47
SUMSEL	2012	80.46	229,958	107,043	7609.6
SUMSEL	2013	83.85	369,873	169,740	8049.08
KEPBABEL	2009	84.95	111,761	186,903	8456
KEPBABEL	2010	84.29	63,717	160,813	8709.61
KEPBABEL	2011	83.88	50,221	45,061	9076.26
KEPBABEL	2012	85.16	59,220	50,240	9393.92
KEPBABEL	2013	87.39	64,289	99,669	9676.76
BENGGULU	2009	86.93	181,774	313,347	4634.13
BENGGULU	2010	85.64	157,995	241,699	4842.7
BENGGULU	2011	85.34	126,093	63,213	5065.06
BENGGULU	2012	88.04	128,544	84,318	5306.22
BENGGULU	2013	88.45	118,497	380,049	5540.42
LAMPUNG	2009	84.56	275,841	1,037,569	4749.26
LAMPUNG	2010	84.40	300,805	842,923	4979.65
LAMPUNG	2011	83.66	271,914	105,735	5230.6
LAMPUNG	2012	84.91	502,434	204,114	5502.79
LAMPUNG	2013	85.31	385,133	487,875	5755.31
DKIJAKARTA	2009	93.83	354,000	1,286,589	38951.56
DKIJAKARTA	2010	93.35	380,500	937,753	40939.43
DKIJAKARTA	2011	93.77	520,000	91,246	43195.94
DKIJAKARTA	2012	95.67	590,000	345,656	45509.95
DKIJAKARTA	2013	96.81	650,000	710,294	47774.7
JABAR	2009	83.09	744,335	1,264,514	6934.11
JABAR	2010	83.47	938,094	707,373	7245.23
JABAR	2011	84.46	969,564	256,049	7613.76
JABAR	2012	85.55	1,155,548	549,848	7988.92
JABAR	2013	85.96	1,166,027	785,410	8355.29
BANTEN	2009	82.38	165,985	1,275,699	8020.32
BANTEN	2010	83.81	211,454	966,851	8284.73
BANTEN	2011	84.25	231,191	88,239	8607.46
BANTEN	2012	85.10	239,620	203,600	8929.01
BANTEN	2013	85.41	307,506	476,999	9243.06
JATENG	2009	86.33	690,742	1,233,423	5137.18
JATENG	2010	86.48	917,476	761,102	5430.52
JATENG	2011	87.19	1,131,092	276,114	5721.7

JATENG	2012	87.35	1,199,703	312,887	6055.96
JATENG	2013	87.86	1,079,173	651,718	6382.36
DIY	2009	92.80	114,633	586,028	5839.38
DIY	2010	92.05	173,395	440,990	6068.96
DIY	2011	93.90	97,218	89,426	6305.35
DIY	2012	94.41	197,321	162,844	6561.24
DIY	2013	94.82	378,409	325,245	6834.07
JATIM	2009	87.40	884,661	1,179,518	8559.51
JATIM	2010	88.58	937,652	907,452	9067.15
JATIM	2011	89.14	1,076,157	309,755	9649.71
JATIM	2012	89.33	1,112,449	367,485	10283.36
JATIM	2013	89.72	1,112,746	522,643	10885.77
BALI	2009	89.64	168,548	574,031	7126.28
BALI	2010	88.21	187,453	412,512	7391.7
BALI	2011	79.34	115,326	108,125	7771.9
BALI	2012	77.81	88,770	98,493	8186.29
BALI	2013	83.11	121,776	269,021	8576.19
NTB	2009	83.95	186,984	757,324	4223.88
NTB	2010	84.05	204,620	507,520	4444.72
NTB	2011	82.66	169,935	99,785	4263.21
NTB	2012	86.21	206,327	162,646	4157.39
NTB	2013	86.72	205,929	369,667	4334.1
NTT	2009	76.26	396,995	810,068	2582.9
NTT	2010	75.90	309,846	652,735	2666.02
NTT	2011	77.03	457,013	110,573	2767.46
NTT	2012	80.01	485,010	195,171	2867.82
NTT	2013	80.31	379,349	391,516	2976.62
KALBAR	2009	77.18	284,851	666,433	6573.55
KALBAR	2010	76.96	248,656	326,855	6875.14
KALBAR	2011	78.35	352,453	389,646	7160.2
KALBAR	2012	80.52	363,604	126,601	7448.63
KALBAR	2013	81.08	332,610	337,385	7772.47
KALTENG	2009	80.15	200,299	372,605	8087.5
KALTENG	2010	81.74	124,641	262,216	8467.9
KALTENG	2011	80.27	116,024	82,422	8825.07
KALTENG	2012	81.95	118,097	89,248	9194.19
KALTENG	2013	82.51	144,610	188,957	9644.55
KALSEL	2009	79.24	239,861	508,908	7996.59
KALSEL	2010	80.44	271,205	387,118	8292.29

KALSEL	2011	80.73	108,367	90,206	8642.48
KALSEL	2012	81.89	118,882	99,810	8978.04
KALSEL	2013	82.63	126,289	273,092	9282.23
KALTIM	2009	84.06	113,777	519,571	17404.87
KALTIM	2010	83.68	37,004	401,649	18747.04
KALTIM	2011	84.91	66,907	90,320	20447.8
KALTIM	2012	87.06	82,925	125,587	22147.59
KALTIM	2013	87.40	108,230	276,575	22698.16
SULUT	2009	85.95	261,562	432,797	7606.5
SULUT	2010	84.70	261,284	316,827	8053.45
SULUT	2011	80.38	209,466	77,013	8542.91
SULUT	2012	83.37	211,086	90,787	9103.16
SULUT	2013	87.93	211,278	206,841	9671.14
GORONTALO	2009	78.17	107,774	254,587	2649.4
GORONTALO	2010	76.90	96,774	182,036	2792.35
GORONTALO	2011	73.86	71,116	67,343	2956.5
GORONTALO	2012	74.68	71,217	69,297	3132.33
GORONTALO	2013	78.22	81,989	131,458	3321.11
SULTENG	2009	78.96	205,014	501,637	6139.71
SULTENG	2010	76.60	154,410	363,508	6551.13
SULTENG	2011	81.93	231,880	88,725	7027.34
SULTENG	2012	80.06	225,303	96,670	7559.01
SULTENG	2013	79.62	179,989	242,585	8156.16
SULSEL	2009	84.69	509,476	972,793	5922.89
SULSEL	2010	84.51	453,139	719,747	6338.57
SULSEL	2011	84.43	452,127	138,187	6740.78
SULSEL	2012	86.68	453,716	244,805	7225.27
SULSEL	2013	87.01	468,206	582,784	7692.69
SULBAR	2009	78.39	98,403	232,336	3733.15
SULBAR	2010	78.26	78,782	191,199	4073.3
SULBAR	2011	80.94	103,016	58,033	4406.87
SULBAR	2012	81.79	128,853	65,791	4711.52
SULBAR	2013	81.25	117,183	137,012	4952.51
SULTRA	2009	82.34	239,502	458,048	4896.24
SULTRA	2010	81.40	227,650	356,423	5194.32
SULTRA	2011	80.12	209,688	80,167	5534.42
SULTRA	2012	85.94	215,488	120,886	5977.64
SULTRA	2013	83.53	203,960	252,470	6275.62
MALUKU	2009	81.58	138,628	333,869	2651.26

MALUKU	2010	81.96	155,308	271,286	2748.39
MALUKU	2011	82.80	160,453	74,144	2861.72
MALUKU	2012	85.56	172,280	100,222	3029.7
MALUKU	2013	86.41	166,211	197,851	3128.99
MALUT	2009	84.76	142,682	218,576	2759.06
MALUT	2010	85.58	83,427	184,105	2909.56
MALUT	2011	86.00	127,504	65,021	3026.62
MALUT	2012	87.11	139,789	69,710	3157.9
MALUT	2013	87.46	132,997	132,217	3279.5
PAPUA	2009	77.16	312,316	446,046	8525.91
PAPUA	2010	76.56	417,447	344,147	7840.49
PAPUA	2011	76.45	720,734	95,125	7274.75
PAPUA	2012	76.70	602,584	123,139	7208.25
PAPUA	2013	77.05	549,057	213,556	8117.64
PAPBAR	2009	74.23	125,017	170,987	7373.1
PAPBAR	2010	73.99	92,549	132,717	7723.79
PAPBAR	2011	75.33	147,903	53,293	8280.36
PAPBAR	2012	76.02	157,161	61,458	8668.87
PAPBAR	2013	76.50	152,599	92,020	9106.88

Sumber: Kemendikbud, Kemenkeu, BPS

Lampiran 2 :

**Data LN Angka Partisipasi Murni Pendidikan Dasar (LN_APMPD), Dana Alokasi Khusus untuk pendidikan (LN_DAK), Dana Dekonsentrasi untuk pendidikan (LN_DEKON) dan Pendapatan Perkapita (LnY_PERKAPITA)
Tahun 2009-2013**

PROVINSI	TAHUN	LN_APMPD	LN_DAK	LN_DEKON	LnY_PERKAPITA
NAD	2009	4.426620274	26.0659924	27.31921069	8.764390712
NAD	2010	4.436321608	26.2431976	26.98647939	8.768325381
NAD	2011	4.44642687	26.2467407	25.53457175	8.802684867
NAD	2012	4.459567545	26.2641489	25.77706721	8.841024438
NAD	2013	4.463529661	26.4274271	26.61324976	8.873120656
SUMUT	2009	4.448174912	27.1770688	27.61869979	9.058897523
SUMUT	2010	4.445750329	27.1268285	27.52552808	9.111109918
SUMUT	2011	4.454641844	27.2005474	25.85501372	9.160689938
SUMUT	2012	4.476480702	27.2650531	27.51016102	9.207508366
SUMUT	2013	4.481516525	27.3149274	26.70077667	9.252600692
SUMBAR	2009	4.47910774	26.5651945	27.49322959	8.940690734
SUMBAR	2010	4.494099136	26.3763268	27.23722976	8.98564061
SUMBAR	2011	4.508744308	26.3539327	25.37185334	9.032486819
SUMBAR	2012	4.521753374	26.3633237	25.74006094	9.080782788
SUMBAR	2013	4.516435456	26.3400999	26.77236955	9.127573791
RIAU	2009	4.442496609	25.2983582	27.38566292	9.038842428
RIAU	2010	4.411849783	24.6317626	27.127608	9.074023389
RIAU	2011	4.426114914	24.8099982	26.35835205	9.12198664
RIAU	2012	4.479457026	25.2597717	25.5760916	9.171340674
RIAU	2013	4.484186193	25.4683806	26.53143946	9.204922723
KEPRIAU	2009	4.497542949	24.4918341	25.94322416	9.447165108
KEPRIAU	2010	4.478697598	24.2088656	25.90577735	9.491386727
KEPRIAU	2011	4.373155922	23.8185267	24.60290669	9.55091632
KEPRIAU	2012	4.405470916	23.9941647	24.79810259	9.60976997
KEPRIAU	2013	4.525675235	24.3076197	25.41972045	9.659187395
JAMBI	2009	4.435742513	25.6072413	26.92147648	8.484070647
JAMBI	2010	4.437669804	26.1530149	26.63537036	8.526188611
JAMBI	2011	4.418309644	25.5437813	25.01620224	8.574083792
JAMBI	2012	4.422201443	25.557991	25.24129407	8.638805331
JAMBI	2013	4.474204992	27.067987	26.16024922	8.703078391
SUMSEL	2009	4.370026407	26.330218	27.59236084	8.763343643
SUMSEL	2010	4.363321891	26.2070955	27.44480516	8.813612483
SUMSEL	2011	4.344748828	26.0832614	26.89439089	8.875911846

SUMSEL	2012	4.387746679	26.1611625	25.3965024	8.937165887
SUMSEL	2013	4.429072308	26.636428	25.85753377	8.993313078
KEPBABEL	2009	4.442044364	25.4396285	25.95385619	9.042631528
KEPBABEL	2010	4.434241902	24.8777172	25.8035131	9.072182293
KEPBABEL	2011	4.429443492	24.6396991	24.53129151	9.113417492
KEPBABEL	2012	4.444513374	24.8045252	24.64009553	9.14781795
KEPBABEL	2013	4.470424877	24.8866559	25.32512808	9.177482413
BENGKULU	2009	4.465081642	25.92603	26.47057753	8.441203758
BENGKULU	2010	4.450114376	25.7858292	26.21095972	8.485227695
BENGKULU	2011	4.446641567	25.5602856	24.8697853	8.530121263
BENGKULU	2012	4.477773686	25.5795371	25.15787012	8.576634996
BENGKULU	2013	4.482412885	25.4981582	26.66356807	8.619825589
LAMPUNG	2009	4.437437569	26.3430905	27.66790252	8.465744095
LAMPUNG	2010	4.435601459	26.4297281	27.46014182	8.513114886
LAMPUNG	2011	4.426770767	26.3287517	25.38420909	8.562281273
LAMPUNG	2012	4.441585722	26.9427301	26.04194907	8.613010515
LAMPUNG	2013	4.446302122	26.6768554	26.91332642	8.657878186
DKIJAKARTA	2009	4.541432265	26.5925628	27.88301614	9.849641529
DKIJAKARTA	2010	4.536306494	26.664752	27.56675313	9.949389263
DKIJAKARTA	2011	4.54085853	26.9770947	25.23683053	10.05173254
DKIJAKARTA	2012	4.560880395	27.1033884	26.56871161	10.14682385
DKIJAKARTA	2013	4.572755238	27.2002382	27.28894598	10.23188081
JABAR	2009	4.419984427	27.335757	27.86570916	8.84420799
JABAR	2010	4.424512072	27.567116	27.28482473	8.8880986
JABAR	2011	4.436260102	27.6001123	26.26863558	8.937712416
JABAR	2012	4.449072115	27.7755958	27.03290846	8.985810861
JABAR	2013	4.453896046	27.7846238	27.38947235	9.03065015
BANTEN	2009	4.411359669	25.8351633	27.87451543	8.9897336
BANTEN	2010	4.428515561	26.0772733	27.597311	9.02216934
BANTEN	2011	4.433837922	26.1665101	25.20332212	9.060384548
BANTEN	2012	4.443779235	26.2023202	26.03942529	9.097060805
BANTEN	2013	4.447421349	26.451763	26.89078119	9.131628279
JATENG	2009	4.458204787	27.2610322	27.84081493	8.54425957
JATENG	2010	4.459896277	27.5448923	27.35803418	8.599790173
JATENG	2011	4.46804343	27.7542047	26.34408103	8.652021243
JATENG	2012	4.469892439	27.8130951	26.46911042	8.70879819
JATENG	2013	4.475691772	27.7072162	27.20287848	8.761293214
DIY	2009	4.53040322	25.4650016	27.09663492	8.672379906
DIY	2010	4.522331447	25.8788381	26.81228908	8.710942535

DIY	2011	4.54218276	25.3002217	25.21668143	8.749153758
DIY	2012	4.547646533	26.0080977	25.81606325	8.788934888
DIY	2013	4.552010348	26.6592439	26.50784672	8.829675676
JATIM	2009	4.47045286	27.5084704	27.79612781	9.054798225
JATIM	2010	4.483912461	27.5666447	27.5339073	9.112413271
JATIM	2011	4.490224112	27.7044175	26.4590484	9.174683142
JATIM	2012	4.492291139	27.737585	26.62995015	9.238282334
JATIM	2013	4.496660683	27.7378528	26.98216537	9.295211711
BALI	2009	4.495792938	25.8504864	27.07595023	8.871544638
BALI	2010	4.479746544	25.956794	26.74553192	8.908113028
BALI	2011	4.373761732	25.4710287	25.40655849	8.958269944
BALI	2012	4.354325002	25.2093146	25.31325771	9.010216083
BALI	2013	4.420185971	25.5254551	26.31805693	9.056745038
NTB	2009	4.430232774	25.9542889	27.3530572	8.348509416
NTB	2010	4.431391053	26.0444204	26.9528032	8.399472154
NTB	2011	4.414787376	25.8586819	25.32628739	8.357777677
NTB	2012	4.456745553	26.0527281	25.81484747	8.332642753
NTB	2013	4.462645923	26.0508019	26.63586859	8.374269255
NTT	2009	4.334202881	26.7071895	27.42038505	7.856668078
NTT	2010	4.329434619	26.4593412	27.20443828	7.888342003
NTT	2011	4.344162609	26.8479777	25.42894822	7.925685211
NTT	2012	4.382137164	26.9074354	25.99714213	7.961307438
NTT	2013	4.38584467	26.661725	26.69329411	7.998543708
KALBAR	2009	4.346152849	26.3752321	27.22520617	8.7908093
KALBAR	2010	4.34329398	26.2393363	26.51278278	8.835667286
KALBAR	2011	4.361239341	26.5881831	26.68850539	8.876293193
KALBAR	2012	4.388507511	26.6193312	25.56431414	8.915785402
KALBAR	2013	4.395477604	26.5302385	26.54449234	8.958343282
KALTENG	2009	4.383885116	26.0230771	26.64378593	8.998074939
KALTENG	2010	4.403498764	25.5487034	26.29243539	9.044037823
KALTENG	2011	4.385414451	25.4770629	25.13512977	9.085351814
KALTENG	2012	4.406096821	25.4947722	25.21468599	9.126327042
KALTENG	2013	4.412898267	25.6973094	25.96478639	9.174148268
KALSEL	2009	4.372442648	26.2033254	26.95553429	8.98677048
KALSEL	2010	4.387463849	26.3261408	26.68199764	9.023081446
KALSEL	2011	4.391091955	25.4087895	25.2253638	9.064444858
KALSEL	2012	4.405415604	25.5013972	25.32654155	9.102536875
KALSEL	2013	4.414333364	25.5618439	26.33307654	9.135857099
KALTIM	2009	4.431488596	25.4575062	26.97627083	9.764505331

KALTIM	2010	4.426954288	24.3342919	26.7188458	9.838791152
KALTIM	2011	4.441551551	24.9265694	25.22662853	9.925630576
KALTIM	2012	4.466601559	25.1412024	25.5562719	10.00548397
KALTIM	2013	4.470484209	25.4075317	26.34574925	10.03003914
SULUT	2009	4.453753775	26.2899372	26.79353465	8.936758424
SULUT	2010	4.439104899	26.2888738	26.48162288	8.99385585
SULUT	2011	4.386801354	26.0678273	25.06724585	9.052856978
SULUT	2012	4.423334667	26.0755315	25.23179142	9.116376885
SULUT	2013	4.476513166	26.0764439	26.05521688	9.176901472
GORONTALO	2009	4.358882807	25.4033023	26.26291147	7.882088478
GORONTALO	2010	4.342485058	25.2956442	25.92747253	7.934638814
GORONTALO	2011	4.302134074	24.9875782	24.93307524	7.991761415
GORONTALO	2012	4.313156531	24.9889974	24.96167711	8.049532416
GORONTALO	2013	4.359565113	25.1298543	25.60195436	8.108054343
SULTENG	2009	4.368986509	26.0463441	26.94114354	8.722532789
SULTENG	2010	4.338622156	25.7628772	26.61906862	8.787392833
SULTENG	2011	4.405891163	26.1694858	25.20881752	8.857563535
SULTENG	2012	4.382755774	26.140712	25.29457768	8.930495508
SULTENG	2013	4.377238132	25.9161633	26.2146202	9.006528749
SULSEL	2009	4.439039867	26.9566486	27.60343717	8.686579784
SULSEL	2010	4.436889779	26.8394648	27.30216641	8.75440847
SULSEL	2011	4.435957008	26.837229	25.6518784	8.815930924
SULSEL	2012	4.462256231	26.8407373	26.22373074	8.885339883
SULSEL	2013	4.465977691	26.8721756	27.0910832	8.948025806
SULBAR	2009	4.361674686	25.3123371	26.1714536	8.22500766
SULBAR	2010	4.360076901	25.0899504	25.97658078	8.312208761
SULBAR	2011	4.393686687	25.3581502	24.78429319	8.390919966
SULBAR	2012	4.404179129	25.5819381	24.90975976	8.457765853
SULBAR	2013	4.397569797	25.4870091	25.64333688	8.507649798
SULTRA	2009	4.410914508	26.2018276	26.85024168	8.496222843
SULTRA	2010	4.39931611	26.1510752	26.59938436	8.555321
SULTRA	2011	4.383576745	26.0688866	25.1073863	8.618742052
SULTRA	2012	4.453684481	26.0961711	25.51811575	8.69578112
SULTRA	2013	4.425248678	26.0411935	26.25455968	8.744427564
MALUKU	2009	4.401581668	25.6550599	26.53401728	7.882790278
MALUKU	2010	4.406240291	25.7686761	26.32644137	7.918770565
MALUKU	2011	4.416482611	25.8012669	25.02928823	7.959178122
MALUKU	2012	4.449193293	25.8723869	25.33065853	8.016218884
MALUKU	2013	4.459054614	25.8365282	26.01078479	8.048465548

MALUT	2009	4.439850919	25.6838842	26.11040101	7.922645321
MALUT	2010	4.449429756	25.1472378	25.93877273	7.975757146
MALUT	2011	4.454382853	25.5714136	24.89797661	8.015201764
MALUT	2012	4.467146165	25.6634	24.96761389	8.057662529
MALUT	2013	4.471216787	25.6135999	25.60771104	8.095446251
PAPUA	2009	4.345839184	26.4672813	26.82368921	9.050865041
PAPUA	2010	4.338099597	26.7574234	26.56433711	8.967056611
PAPUA	2011	4.336645887	27.303536	25.27846481	8.892164727
PAPUA	2012	4.339964206	27.1244929	25.5365802	8.882981482
PAPUA	2013	4.344400955	27.0314688	26.08716785	9.001794751
PAPBAR	2009	4.307111404	25.5517156	25.86485715	8.905593521
PAPBAR	2010	4.303915504	25.2510041	25.61148949	8.952060455
PAPBAR	2011	4.321903516	25.7198225	24.69907556	9.021641725
PAPBAR	2012	4.331042725	25.7805366	24.84162856	9.067493727
PAPBAR	2013	4.337328927	25.7510835	25.2452797	9.116785451

Sumber: Kemendikbud, Kemenkeu, BPS (diolah peneliti melalui Ms. Excel)

Lampiran 3 :

**Model *Common Effect* Pada Model Persamaan Angka Partisipasi Murni
Pendidikan Dasar**

Dependent Variable: LN_APMPD?				
Method: Pooled Least Squares				
Date: 07/08/15 Time: 22:48				
Sample: 2009 2013				
Included observations: 5				
Cross-sections included: 33				
Total pool (balanced) observations: 165				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	3.611941	0.160062	22.56583	0.0000
LN_DAK?	0.009075	0.005587	1.624325	0.1063
LN_DEKON?	0.008208	0.005380	1.525742	0.1290
LNY_PERKAPITA?	0.041247	0.008413	4.902771	0.0000
R-squared	0.179519	Mean dependent var		4.428896
Adjusted R-squared	0.164231	S.D. dependent var		0.057066
S.E. of regression	0.052170	Akaike info criterion		-3.044669
Sum squared resid	0.438197	Schwarz criterion		-2.969374
Log likelihood	255.1852	Hannan-Quinn criter.		-3.014104
F-statistic	11.74215	Durbin-Watson stat		0.229616
Prob(F-statistic)	0.000001			

Lampiran 4 :

**Model *Fixed Effect* Pada Model Persamaan Angka Partisipasi Murni
Pendidikan Dasar**

Dependent Variable: LN_APMPD?				
Method: Pooled Least Squares				
Date: 07/08/15 Time: 22:49				
Sample: 2009 2013				
Included observations: 5				
Cross-sections included: 33				
Total pool (balanced) observations: 165				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2.204389	0.276497	7.972564	0.0000
LN_DAK?	0.036709	0.006741	5.445844	0.0000
LN_DEKON?	0.005225	0.002612	2.000677	0.0475
LN_Y_PERKAPITA?	0.127719	0.024234	5.270153	0.0000
Fixed Effects (Cross)				
_NAD—C	0.015133			
_SUMUT—C	-0.053151			
_SUMBAR—C	0.038202			
_RIAU—C	0.019221			
_KEPRIAU—C	0.012371			
_JAMBI—C	0.046990			
_SUMSEL—C	-0.063154			
_KEPBABEL—C	0.029053			
_BENGKULU—C	0.092978			
_LAMPUNG—C	0.025679			
_DKIJAKARTA—C	-0.065348			
_JABAR—C	-0.064698			
_BANTEN—C	-0.028003			
_JATENG—C	0.001711			
_DIY—C	0.130210			
_JATIM—C	-0.046052			
_BALI—C	-0.000712			
_NTB—C	0.074539			
_NTT—C	0.018986			
_KALBAR—C	-0.081217			
_KALTENG—C	-0.043023			
_KALSEL—C	-0.051201			
_KALTIM—C	-0.079438			
_SULUT—C	-0.020792			
_GORONTALO—C	0.052895			
_SULTENG—C	-0.052236			

_SULSEL—C	-0.008842		
_SULBAR—C	0.044546		
_SULTRA—C	0.014215		
_MALUKU—C	0.123171		
_MALUT—C	0.157897		
_PAPUA—C	-0.132612		
_PAPBAR—C	-0.107320		
Effects Specification			
Cross-section fixed (dummy variables)			
R-squared	0.902656	Mean dependent var	4.428896
Adjusted R-squared	0.876245	S.D. dependent var	0.057066
S.E. of regression	0.020075	Akaike info criterion	-4.788430
Sum squared resid	0.051989	Schwarz criterion	-4.110769
Log likelihood	431.0455	Hannan-Quinn criter.	-4.513344
F-statistic	34.17708	Durbin-Watson stat	1.637270
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran 5 :

Uji Chow Pada Model Persamaan Angka Partisipasi Murni Pendidikan Dasar

Redundant Fixed Effects Tests				
Pool: Untitled				
Test cross-section fixed effects				
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.	
Cross-section F	29.946848	(32,129)	0.0000	
Cross-section Chi-square	351.720540	32	0.0000	
Cross-section fixed effects test equation:				
Dependent Variable: LN_APMPD?				
Method: Panel Least Squares				
Date: 07/08/15 Time: 22:49				
Sample: 2009 2013				
Included observations: 5				
Cross-sections included: 33				
Total pool (balanced) observations: 165				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	3.611941	0.160062	22.56583	0.0000
LN_DAK?	0.009075	0.005587	1.624325	0.1063
LN_DEKON?	0.008208	0.005380	1.525742	0.1290
LN_Y_PERKAPITA?	0.041247	0.008413	4.902771	0.0000
R-squared	0.179519	Mean dependent var	4.428896	
Adjusted R-squared	0.164231	S.D. dependent var	0.057066	
S.E. of regression	0.052170	Akaike info criterion	3.044669	
Sum squared resid	0.438197	Schwarz criterion	2.969374	
Log likelihood	255.1852	Hannan-Quinn criter.	3.014104	
F-statistic	11.74215	Durbin-Watson stat	0.229616	
Prob(F-statistic)	0.000001			

Lampiran 6 :

**Model Regresi *Random Effect* Pada Model Persamaan Angka Partisipasi
Murni Pendidikan Dasar**

Dependent Variable: LN_APMPD?				
Method: Pooled EGLS (Cross-section random effects)				
Date: 07/08/15 Time: 22:50				
Sample: 2009 2013				
Included observations: 5				
Cross-sections included: 33				
Total pool (balanced) observations: 165				
Swamy and Arora estimator of component variances				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2.921430	0.196418	14.87352	0.0000
LN_DAK?	0.031338	0.005626	5.569837	0.0000
LN_DEKON?	0.002140	0.002377	0.900155	0.3694
LN_Y_PERKAPITA?	0.071640	0.013997	5.118246	0.0000
Random Effects (Cross)				
_NAD--C	0.014208			
_SUMUT--C	-0.026040			
_SUMBAR--C	0.049563			
_RIAU--C	0.029504			
_KEPRIAU--C	0.037557			
_JAMBI--C	0.030078			
_SUMSEL--C	-0.056959			
_KEPBABEL--C	0.033512			
_BENGKULU--C	0.069492			
_LAMPUNG--C	0.013255			
_DKIJAKARTA--C	0.008220			
_JABAR--C	-0.046701			
_BANTEN--C	-0.013580			
_JATENG--C	0.001642			
_DIY--C	0.119523			
_JATIM--C	-0.015912			
_BALI--C	0.002926			
_NTB--C	0.045894			
_NTT--C	-0.027161			
_KALBAR--C	-0.073874			
_KALTENG--C	-0.031871			
_KALSEL--C	-0.039463			
_KALTIM--C	-0.024390			
_SULUT--C	-0.009185			

_GORONTALO--C	-0.001890		
_SULTENG--C	-0.050443		
_SULSEL--C	-0.004292		
_SULBAR--C	0.011851		
_SULTRA--C	0.001317		
_MALUKU--C	0.068546		
_MALUT--C	0.102340		
_PAPUA--C	-0.117853		
_PAPBAR--C	-0.099814		
Effects Specification			
		S.D.	Rho
Cross-section random		0.046942	0.8454
Idiosyncratic random		0.020075	0.1546
Weighted Statistics			
R-squared	0.268444	Mean dependent var	0.831975
Adjusted R-squared	0.254812	S.D. dependent var	0.024358
S.E. of regression	0.021027	Sum squared resid	0.071185
F-statistic	19.69292	Durbin-Watson stat	1.235917
Prob(F-statistic)	0.000000		
Unweighted Statistics			
R-squared	0.030537	Mean dependent var	4.428896
Sum squared resid	0.517765	Durbin-Watson stat	0.169921

Lampiran 7 :

Uji Hausman Pada Model Persamaan Angka Partisipasi Murni Pendidikan Dasar

Correlated Random Effects - Hausman Test				
Pool: Untitled				
Test cross-section random effects				
Test Summary		Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random		18.632093	3	0.0003
Cross-section random effects test comparisons:				
Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.

LN_DAK?	0.036709	0.031338	0.000014	0.1479
LN_DEKON?	0.005225	0.002140	0.000001	0.0043
LN_Y_PERKAPITA?	0.127719	0.071640	0.000391	0.0046
Cross-section random effects test equation: Dependent Variable: LN_APMPD? Method: Panel Least Squares Date: 07/08/15 Time: 22:50 Sample: 2009 2013 Included observations: 5 Cross-sections included: 33 Total pool (balanced) observations: 165				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2.204389	0.276497	7.972564	0.0000
LN_DAK?	0.036709	0.006741	5.445844	0.0000
LN_DEKON?	0.005225	0.002612	2.000677	0.0475
LN_Y_PERKAPITA?	0.127719	0.024234	5.270153	0.0000
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.902656	Mean dependent var		4.428896
Adjusted R-squared	0.876245	S.D. dependent var		0.057066
S.E. of regression	0.020075	Akaike info criterion		-4.788430
Sum squared resid	0.051989	Schwarz criterion		-4.110769
Log likelihood	431.0455	Hannan-Quinn criter.		-4.513344
F-statistic	34.17708	Durbin-Watson stat		1.637270
Prob(F-statistic)	0.000000			

Lampiran 8 :

Tabel T

Titik Persentase Distribusi t (df = 161 –200)

df \ Pr	0.25	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005	0.001
	0.50	0.20	0.10	0.050	0.02	0.010	0.002
161	0.67602	1.28683	1.65437	1.97481	2.34973	2.60671	3.14162
162	0.67601	1.28680	1.65431	1.97472	2.34959	2.60652	3.14130
163	0.67600	1.28677	1.65426	1.97462	2.34944	2.60633	3.14098
164	0.67599	1.28673	1.65420	1.97453	2.34930	2.60614	3.14067
165	0.67598	1.28670	1.65414	1.97445	2.34916	2.60595	3.14036
166	0.67597	1.28667	1.65408	1.97436	2.34902	2.60577	3.14005
167	0.67596	1.28664	1.65403	1.97427	2.34888	2.60559	3.13975
168	0.67595	1.28661	1.65397	1.97419	2.34875	2.60541	3.13945
169	0.67594	1.28658	1.65392	1.97410	2.34862	2.60523	3.13915
170	0.67594	1.28655	1.65387	1.97402	2.34848	2.60506	3.13886
171	0.67593	1.28652	1.65381	1.97393	2.34835	2.60489	3.13857
172	0.67592	1.28649	1.65376	1.97385	2.34822	2.60471	3.13829
173	0.67591	1.28646	1.65371	1.97377	2.34810	2.60455	3.13801
174	0.67590	1.28644	1.65366	1.97369	2.34797	2.60438	3.13773
175	0.67589	1.28641	1.65361	1.97361	2.34784	2.60421	3.13745
176	0.67589	1.28638	1.65356	1.97353	2.34772	2.60405	3.13718
177	0.67588	1.28635	1.65351	1.97346	2.34760	2.60389	3.13691
178	0.67587	1.28633	1.65346	1.97338	2.34748	2.60373	3.13665
179	0.67586	1.28630	1.65341	1.97331	2.34736	2.60357	3.13638
180	0.67586	1.28627	1.65336	1.97323	2.34724	2.60342	3.13612
181	0.67585	1.28625	1.65332	1.97316	2.34713	2.60326	3.13587
182	0.67584	1.28622	1.65327	1.97308	2.34701	2.60311	3.13561
183	0.67583	1.28619	1.65322	1.97301	2.34690	2.60296	3.13536
184	0.67583	1.28617	1.65318	1.97294	2.34678	2.60281	3.13511
185	0.67582	1.28614	1.65313	1.97287	2.34667	2.60267	3.13487
186	0.67581	1.28612	1.65309	1.97280	2.34656	2.60252	3.13463
187	0.67580	1.28610	1.65304	1.97273	2.34645	2.60238	3.13438
188	0.67580	1.28607	1.65300	1.97266	2.34635	2.60223	3.13415
189	0.67579	1.28605	1.65296	1.97260	2.34624	2.60209	3.13391
190	0.67578	1.28602	1.65291	1.97253	2.34613	2.60195	3.13368
191	0.67578	1.28600	1.65287	1.97246	2.34603	2.60181	3.13345
192	0.67577	1.28598	1.65283	1.97240	2.34593	2.60168	3.13322
193	0.67576	1.28595	1.65279	1.97233	2.34582	2.60154	3.13299
194	0.67576	1.28593	1.65275	1.97227	2.34572	2.60141	3.13277
195	0.67575	1.28591	1.65271	1.97220	2.34562	2.60128	3.13255
196	0.67574	1.28589	1.65267	1.97214	2.34552	2.60115	3.13233
197	0.67574	1.28586	1.65263	1.97208	2.34543	2.60102	3.13212
198	0.67573	1.28584	1.65259	1.97202	2.34533	2.60089	3.13190
199	0.67572	1.28582	1.65255	1.97196	2.34523	2.60076	3.13169
200	0.67572	1.28580	1.65251	1.97190	2.34514	2.60063	3.13148

Sumber: <http://ledhyane.lecture.ub.ac.id/files/2013/04/tabel-t.pdf>

Lampiran 9 :

Tabel F

Titik Persentase Distribusi F untuk Probabilita = 0,05															
df untuk penyebut (k2)	df untuk pembilang (N1)														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
136	3.91	3.06	2.67	2.44	2.28	2.17	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.82	1.79	1.77	1.74
137	3.91	3.06	2.67	2.44	2.28	2.17	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.82	1.79	1.76	1.74
138	3.91	3.06	2.67	2.44	2.28	2.16	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.82	1.79	1.76	1.74
139	3.91	3.06	2.67	2.44	2.28	2.16	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.82	1.79	1.76	1.74
140	3.91	3.06	2.67	2.44	2.28	2.16	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.82	1.79	1.76	1.74
141	3.91	3.06	2.67	2.44	2.28	2.16	2.08	2.00	1.95	1.90	1.86	1.82	1.79	1.76	1.74
142	3.91	3.06	2.67	2.44	2.28	2.16	2.07	2.00	1.95	1.90	1.86	1.82	1.79	1.76	1.74
143	3.91	3.06	2.67	2.43	2.28	2.16	2.07	2.00	1.95	1.90	1.86	1.82	1.79	1.76	1.74
144	3.91	3.06	2.67	2.43	2.28	2.16	2.07	2.00	1.95	1.90	1.86	1.82	1.79	1.76	1.74
145	3.91	3.06	2.67	2.43	2.28	2.16	2.07	2.00	1.94	1.90	1.86	1.82	1.79	1.76	1.74
146	3.91	3.06	2.67	2.43	2.28	2.16	2.07	2.00	1.94	1.90	1.85	1.82	1.79	1.76	1.74
147	3.91	3.06	2.67	2.43	2.28	2.16	2.07	2.00	1.94	1.90	1.85	1.82	1.79	1.76	1.73
148	3.91	3.06	2.67	2.43	2.28	2.16	2.07	2.00	1.94	1.90	1.85	1.82	1.79	1.76	1.73
149	3.90	3.06	2.67	2.43	2.27	2.16	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.82	1.79	1.76	1.73
150	3.90	3.06	2.66	2.43	2.27	2.16	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.82	1.79	1.76	1.73
151	3.90	3.06	2.66	2.43	2.27	2.16	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.82	1.79	1.76	1.73
152	3.90	3.06	2.66	2.43	2.27	2.16	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.82	1.79	1.76	1.73
153	3.90	3.06	2.66	2.43	2.27	2.16	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.82	1.78	1.76	1.73
154	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.16	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.82	1.78	1.76	1.73
155	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.16	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.82	1.78	1.76	1.73
156	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.16	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.76	1.73
157	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.16	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.76	1.73
158	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.16	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.75	1.73
159	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.16	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.75	1.73
160	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.16	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.75	1.73
161	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.16	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.75	1.73
162	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.15	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.75	1.73
163	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.15	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.75	1.73
164	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.15	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.75	1.73
165	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.15	2.07	1.99	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.75	1.73
166	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.15	2.07	1.99	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.75	1.73
167	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.15	2.06	1.99	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.75	1.73
168	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.15	2.06	1.99	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.75	1.73
169	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.15	2.06	1.99	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.75	1.73
170	3.90	3.05	2.66	2.42	2.27	2.15	2.06	1.99	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.75	1.73
171	3.90	3.05	2.66	2.42	2.27	2.15	2.06	1.99	1.93	1.89	1.85	1.81	1.78	1.75	1.73
172	3.90	3.05	2.66	2.42	2.27	2.15	2.06	1.99	1.93	1.89	1.84	1.81	1.78	1.75	1.72
173	3.90	3.05	2.66	2.42	2.27	2.15	2.06	1.99	1.93	1.89	1.84	1.81	1.78	1.75	1.72
174	3.90	3.05	2.66	2.42	2.27	2.15	2.06	1.99	1.93	1.89	1.84	1.81	1.78	1.75	1.72
175	3.90	3.05	2.66	2.42	2.27	2.15	2.06	1.99	1.93	1.89	1.84	1.81	1.78	1.75	1.72
176	3.89	3.05	2.66	2.42	2.27	2.15	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.81	1.78	1.75	1.72
177	3.89	3.05	2.66	2.42	2.27	2.15	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.81	1.78	1.75	1.72
178	3.89	3.05	2.66	2.42	2.26	2.15	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.81	1.78	1.75	1.72
179	3.89	3.05	2.66	2.42	2.26	2.15	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.81	1.78	1.75	1.72
180	3.89	3.05	2.65	2.42	2.26	2.15	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.81	1.77	1.75	1.72

Sumber: <http://ledhyane.lecture.ub.ac.id/files/2013/07/tabel-f-0-05.pdf>

Lampiran 10 :

Tabel Chi-Square
Titik Persentase Distribusi Chi-Square untuk df = 1 - 25

Pr df	0.25	0.10	0.05	0.010	0.005	0.001
1	1.32330	2.70554	3.84146	6.63490	7.87944	10.82757
2	2.77259	4.60517	5.99146	9.21034	10.59663	13.81551
3	4.10834	6.25139	7.81473	11.34487	12.83816	16.26624
4	5.38527	7.77944	9.48773	13.27670	14.86026	18.46683
5	6.62568	9.23636	11.07050	15.08627	16.74960	20.51501
6	7.84080	10.64464	12.59159	16.81189	18.54758	22.45774
7	9.03715	12.01704	14.06714	18.47531	20.27774	24.32189
8	10.21885	13.36157	15.50731	20.09024	21.95495	26.12448
9	11.38875	14.68366	16.91898	21.66599	23.58935	27.87716
10	12.54886	15.98718	18.30704	23.20925	25.18818	29.58830
11	13.70069	17.27501	19.67514	24.72497	26.75685	31.26413
12	14.84540	18.54935	21.02607	26.21697	28.29952	32.90949
13	15.98391	19.81193	22.36203	27.68825	29.81947	34.52818
14	17.11693	21.06414	23.68479	29.14124	31.31935	36.12327
15	18.24509	22.30713	24.99579	30.57791	32.80132	37.69730
16	19.36886	23.54183	26.29623	31.99993	34.26719	39.25235
17	20.48868	24.76904	27.58711	33.40866	35.71847	40.79022
18	21.60489	25.98942	28.86930	34.80531	37.15645	42.31240
19	22.71781	27.20357	30.14353	36.19087	38.58226	43.82020
20	23.82769	28.41198	31.41043	37.56623	39.99685	45.31475
21	24.93478	29.61509	32.67057	38.93217	41.40106	46.79704
22	26.03927	30.81328	33.92444	40.28936	42.79565	48.26794
23	27.14134	32.00690	35.17246	41.63840	44.18128	49.72823
24	28.24115	33.19624	36.41503	42.97982	45.55851	51.17860
25	29.33885	34.38159	37.65248	44.31410	46.92789	52.61966

Sumber : <http://www.unja.ac.id/fe/images/karya-ilmiah/tabel-x2.pdf>

RIWAYAT HIDUP



Lathifa Fitriyani, lahir di Tanjungpandan pada tanggal 06 Mei 1994, merupakan anak kedua dari pasangan Bapak Mustopa Syibli S.sos dan Ibu Dewi Kristalisa. Penulis beralamat di Jalan Murai Air Rayak RT.22 RW.07 Tanjungpandan.

Penulis menempuh pendidikan formal di Sekolah Dasar Negeri pada tahun lulus 1999-2005 di SDN 16 Tanjungpandan. Kemudian melanjutkan ke jenjang sekolah menengah pertama di SMP Negeri 06 Tanjungpandan pada tahun 2005-2008. Kemudian pada tahun yang sama penulis melanjutkan ke SMA Negeri 02 Tanjungpandan pada tahun 2008-2011 dan melanjutkan kuliah di Universitas Negeri Jakarta, Fakultas Ekonomi, Jurusan Ekonomi dan Administrasi, Program Studi Pendidikan Ekonomi, Konsentrasi Pendidikan Ekonomi Koperasi. Penulis mengikuti Program Keterampilan Mengajar (PKM) di SMA Negeri 10 Jakarta serta Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Rawamangun Jakarta Timur pada divisi Keuangan dan Teknologi Informasi.

Pengalaman organisasi di SMA, yaitu anggota Purna Paskribraka Sekolah (PPS) SMA Negeri 02 Tanjungpandan.